

DISERTASI

**PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, INVESTASI, DAN
JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP KESEMPATAN
KERJA DAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

**THE EFFECT OF FOREIGN DEBT, INVESTMENT, AND THE
MONEY SUPPLY ON EMPLOYMENT OPPORTUNITIES AND
POVERTY IN INDONESIA**

**BADRIAH SAPPEWALI
A013171002**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

**PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, INVESTASI, DAN
JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP KESEMPATAN
KERJA DAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

**THE EFFECT OF FOREIGN DEBT, INVESTMENT, AND THE
MONEY SUPPLY ON EMPLOYMENT OPPORTUNITIES AND
POVERTY IN INDONESIA**

**Disertasi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor
Program Studi Ilmu Ekonomi**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**BADRIAH SAPPEWALI
A013171002**



Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

**PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, INVESTASI DAN JUMLAH UANG
BEREDAR TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN KEMISKINAN DI
INDONESIA**

**THE EFFECT OF FOREIGN DEBT, INVESTMENT, AND THE MONEY
SUPPLY ON EMPLOYMENT OPPORTUNITIES AND POVERTY IN
INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

BADRIAH SAPPEWALI

A013171002

Telah diperiksa dan disetujui untuk Ujian Promosi

Makassar, Desember 2022

Promotor



Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA
NIP. 193911061961091001

Kopromotor I



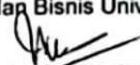
Dr. Madris, DPS, SE., M.Si
NIP. 196012311988111002

Kopromotor II



Dr. Fatmawati, SE., M.Si
NIP. 196401061988032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin



Dr. Madris, DPS, SE., M.Si
196305161990031001

DISERTASI

**PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, INVESTASI, DAN JUMLAH UANG
BEREDAR TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN KEMISKINAN DI
INDONESIA**

**THE EFFECT OF FOREIGN DEBT, INVESTMENT, AND THE MONEY
SUPPLY ON EMPLOYMENT OPPORTUNITIES AND POVERTY IN
INDONESIA**

disusun dan diajukan oleh

**BADRIAH SAPPEWALI
A013171002**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka penyelesaian Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 29 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Promotor


**Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, MA
NIP. 193911061961091001**


Co. Promotor I

Co. Promotor II


**Dr. Madris, DPS, SE., M.SI
NIP. 196012311988111002**


**Dr. Fatmawati, SE., MSI
NIP. 196401061988032001**

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Ekonomi


**Dr. Madris, DPS, SE., M.SI
NIP. 196012311988111002**



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.SI
NIP. 196402051988101001**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Badriah Sappewali
NIM : A013171002
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul

Pengaruh Utang Luar Negeri, Investasi, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Kesempatan Kerja dan Kemiskinan di Indonesia

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,


Badriah Sappewali

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penulisan ini dapat diselesaikan serta dipertahankan.

Penulis sadar bahwa dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan, maka kekurangan penulisan ini akan nampak ke permukaan sebagai persoalan yang tidak terkaji dan teranalisis akibat beberapa kendala yang dihadapi. Namun demikian, atas hasil analisis yang dibuat setidaknya sidang pembaca maklum dan memperoleh informasi baru.

Sehubungan dengan kelemahan yang dikemukakan, maka pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan arahan konstruktif dari sidang pembaca hingga di waktu yang akan datang kajian semacam ini akan lebih diperbaiki. Atas semua hal dimaksud, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang dalam, kiranya Allah SWT jualah berkenan membalasnya.

Kemudian dalam kaitannya dengan bimbingan serta arahan yang diberikan selama penulisan dilakukan, pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa penghargaan yang tulus dan dalam kepada “***yang terhormat***”:

1. Bapak **Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA**. Selaku promotor, yang mana meskipun diwarnai oleh kesibukan sehari-hari, namun masih sempat meluangkan waktu guna memberi petunjuk penulisan untuk disertasi ini.

2. Bapak **Dr. Madris, DPS, SE., M.Si.** Selaku Kopromotor I, yang juga ditengah kesibukan sehari-hari, namun masih bersedia memberi bimbingan atas penulisan ini.
3. Ibu **Dr. Fatmawati, SE., M.Si.** Selaku Kopromotor II, yang juga ditengah kesibukan sehari-hari, namun masih bersedia dan selalu ada dalam memberi bimbingan atas penulisan ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM.** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA** dan Bapak **Dr. Madris, DPS, SE., M.Si.** Selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan kemudahan dalam menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
6. Bapak **Dr. Eka Sastra, SE., M.Si** selaku Penilai Eksternal. Bapak **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Ibu **Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA**, Bapak **Dr. Paulus Uppun, SE., MA**, Ibu **Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si**, Bapak **Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si** selaku Penilai Internal, atas segala perhatian, pertanyaan, saran, maupun kritik dengan segala pengetahuan dan motivasinya selama proses ujian berlangsung demi penyempurnaan disertasi ini.
7. **Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan**, serta seluruh **Civitas Akademika** Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Hasanuddin. Selaku pimpinan, pendidik, staf dan unsur pada tempat dimana penulis menyerap ilmu dan pengetahuan teoritis, atas segala arahan yang selama ini diberikan ketika penulis mengikuti hingga menyelesaikan studi.

8. Penulis tak lupa pula menyampaikan rasa yang sama untuk semua suka duka yang selama ini kita hadapi bersama selaku mahasiswa. Khususnya Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Angkatan 2017 **Sofyan Hamid Indar, Ishak, Vebby Anwar, Rita Yunus, Andi Batary Citta, Yosefina Andia Dekrita, Muhammad Yamin, Hartina, St. Ramlah, Arzal Syah, Muhammad Ikbal, Arman Kamal, Diah Ayu Gustiningsih, La Ode Hidayat, Linda Arisanty Razak, Nasrun Julyarman, Ramly, Syamsul Bakhtiar Ass, Ahmad Ridha T, Goso, Ichwan Riadini, Munadi Idris, Arwen Pawennei.**

9. Semua **Sahabat, Kerabat dan Teman-teman** yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan doa dan dukungan ketika penulis mengikuti hingga menyelesaikan studi.

Pada kesempatan ini pula dengan rasa haru dan bangga penulis menghaturkan “**semua rasa**” kepada “**yang tercinta**”:

1. Suamiku **Budi Setia Nusa, SE., MM** atas doa, cinta, pengertian, kesabaran dan jerih payah yang telah dikorbankan baik moril maupun materil dalam penyelesaian studi **Bunda.**

2. Anakku **Muhammad Andika Setia Negara BS, Andini Badriyah Khairunnisa BS** dan **Muhammad Aditya Setia Negara BS**, atas doa, sayang, pengertian dan kesabaran menanti penyelesaian studi **Bunda**.
3. Kedua orang tuaku Ibunda **Dra. Hj. Mas,ana Baragia** serta Ayahanda **Drs. H.A.R Sappewali Beddu**, atas doa, pengertian dan segala jerih payah yang telah dikorbankan demi membesarkan dan mengarahkan kami, kiranya Allah SWT berkenan memberkahi.
4. Kedua mertuaku **Hj. Asih Sukaesih** serta **Kolonel Inf. (Purn) H. Achmad Rochimi**, atas doa, pengertian dan dorongan semangat dalam penyelesaian studi ini.
5. Adikku **Hj. Malahayaty Sappewali, SE**, saudara sepupuku **Hj. Jawariah Yusuf, S.Pd** dan keponakanku **Aidil Alfiansyah, Ahmad Asya Fahrezi, Ahmad Reza Rahman, Aisyah Al Humairah** yang telah memberikan semangat serta mendoakan penulis dalam penyelesaian studi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada sidang pembaca untuk mendapatkan kegunaannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian demi menyongsong hari esok yang lebih cerah. **Aamiin**

Makassar, 20 November 2022

Badriah Sappewali

ABSTRAK

BADRIAH SAPPEWALI. *Pengaruh Utang Luar Negeri, Investasi, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Kesempatan Kerja dan Kemiskinan di Indonesia.* (Dibimbing oleh Basri Hasanuddin, Madris, dan Fatmawati)

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh utang luar negeri, investasi, dan jumlah uang beredar terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian verifikasi yang bertujuan menguji jawaban yang tertuang dalam hipotesis terhadap masalah yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* di Indonesia dari tahun 1990-2021. Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI), Biro Pusat Statistik (BPS), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui fasilitas internet, karena hampir seluruh data keuangan diperoleh dari Bank Indonesia dan sumber-sumber lainnya, yaitu jurnal dan hasil penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dengan pendekatan kuantitatif melalui penggunaan model struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bertambahnya utang luar negeri akan meningkatkan kemiskinan secara langsung. Utang luar negeri akan mengurangi kemiskinan jika diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Meningkatnya investasi dapat menurunkan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesempatan kerja. Sementara itu, inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat memediasi investasi dan kemiskinan. Jumlah uang beredar tidak memengaruhi kemiskinan secara langsung. Variabel tersebut akan berpengaruh jika mampu menurunkan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.

Kata kunci: utang luar negeri, investasi, jumlah uang beredar, kemiskinan



ABSTRACT

BADRIAH SAPPEWALI. *The Effect of Foreign Debt, Investment, and the Money Supply on Employment Opportunities and Poverty in Indonesia* (supervised by Basri Hasanuddin, Madris, and Fatmawati)

This study aims to analyze the effect of foreign debt, investment, and the money supply on poverty both directly and indirectly through inflation, economic growth, and employment opportunities in Indonesia. This research is a verification study that aims to test the answers containing in the hypothesis to the existing problems. The data used are time series data in Indonesia from 1990 to 2021. The data are secondary data obtained from Indonesia Bank (BI), Statistic Centre Bureau (BPS), and Capital Investment Coordination Bureau (BKPM) through internet facility, where almost all financial data were obtained from Indonesia Bank and other sources, including journals and research results. Furthermore, the data were analyzed with a quantitative approach using a structural model. The results show that increasing foreign debt directly increases poverty. Foreign debt reduce poverty if it is directed to increasing economic growth and expanding job opportunities. Increased investment can reduce poverty both directly and indirectly through employment opportunities. Temporarily inflation and economic growth cannot mediate investment and poverty. Money supply does not directly affect poverty. These variables affect if they can reduce inflation, encourage economic growth, and create jobs.

Keywords: foreign debt, investment, money supply, poverty



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian	19
1.4. Kegunaan Penelitian	20
1.4.1. Kegunaan Teoritis	20
1.4.2. Kegunaan Praktis	21
1.4.3. Kegunaan Kebijakan	21
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1. Tinjauan Teoritis dan Konsep Utang Luar Negeri	23
2.2. Tinjauan Teoritis dan Konsep Investasi	30
2.3. Tinjauan Teoritis dan Konsep Jumlah Uang Beredar	34
2.4. Tinjauan Teoritis dan Konsep Inflasi	40
2.5. Tinjauan Teoritis dan Konsep Pertumbuhan Ekonomi	48
2.6. Tinjauan Teoritis dan Konsep Kesempatan Kerja	56
2.7. Tinjauan Teoritis dan Konsep Kemiskinan	63
2.8. Tinjauan Empiris	72
a. Hubungan Utang Luar Negeri terhadap Kemiskinan	72
b. Hubungan Investasi terhadap Kemiskinan	79
c. Hubungan Jumlah Uang Beredar terhadap Kemiskinan.....	86
d. Hubungan Inflasi terhadap Kemiskinan.....	90
e. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan	93

f. Hubungan Kesempatan Kerja terhadap Kemiskinan	102
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	108
3.1. Kerangka Konseptual Penelitian	108
3.2. Hipotesis Penelitian	113
BAB IV METODE PENELITIAN	115
4.1. Rancangan Penelitian	115
4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	116
4.3. Jenis dan Sumber Data	116
4.4. Metode Pengumpulan Data	117
4.5. Teknik Analisis Data	117
4.6. Definisi Operasional	129
BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN	131
5.1. Gambaran Umum Hasil Penelitian	131
5.2. Hasil Estimasi Pengaruh Utang Luar Negeri, Investasi, Jumlah Uang Beredar, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja dan Kemiskinan di Indonesia	152
BAB VI PEMBAHASAN HASIL ANALISIS	165
6.1. Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Investasi, dan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi	166
6.2. Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Investasi, Jumlah Uang Beredar, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	170
6.3. Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Investasi, Jumlah Uang Beredar, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja	177
6.4. Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Investasi, Jumlah Uang Beredar, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesempatan Kerja terhadap Kemiskinan.....	187
BAB VII PENUTUP	200
7.1. Kesimpulan	200
7.2. Saran	201
DAFTAR PUSTAKA	204
LAMPIRAN	xvi

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
5.1	Pengaruh Langsung Antar Variabel	153
5.2	Pengaruh Tidak Langsung	160
5.3	Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel	163

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Tingkat Kemiskinan di Indonesia Sejak 1990 - 2021	5
4.1	Kerangka Konseptual	109
5.1	Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1990-2021 (Juta Rupiah)	134
5.2	Perkembangan Investasi di Indonesia Tahun 1990-2021 (Milyar Rupiah)	137
5.3	Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 1990-2021 (Triliun Rupiah)	139
5.4	Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 1990-2021 (Persen)	141
5.5	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1990-2021 (Persen)	145
5.6	Perkembangan Kesempatan Kerja di Indonesia Tahun 1990-2021 (Orang)	151
5.7	Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2021 (Persen)	143
5.8	Hasil Estimasi Penelitian	159

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat, dan sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang utama termasuk di Negara Indonesia. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak misteri kemiskinan. Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah yang senantiasa relevan untuk dikaji, namun masalah kemiskinan bukannya semakin berkurang, tetapi justru semakin bertambah jumlahnya.

Di Indonesia kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam ekonomi, sehingga harus ada solusi atau kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan adalah rumit dan kompleks serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Bellinger (2007) menyatakan bahwa konsep kemiskinan melibatkan multidimensi, multidefinisi dan multi alternatif pengukuran. Begitu klasiknya masalah kemiskinan sehingga di era digital seperti saat inipun masalah kemiskinan masih tetap eksis dan selalu ada untuk menjadi pekerjaan rumah kegiatan pembangunan.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Negara Indonesia subur dan kekayaan alamnya yang melimpah, namun rakyatnya yang tergolong miskin cukup besar. Usaha Pemerintah dalam hal upaya untuk penanggulangan kemiskinan sangatlah serius, bahkan program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang direncanakan oleh pemerintah. Menurut Tambunan (2003), masalah besar dalam pembangunan yang dihadapi banyak Negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Kemiskinan masih merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun daerah yang mana sampai saat ini belum terpecahkan. Meskipun beraneka ragam teori telah berupaya mencari penjelasan mengapa terjadi proses kemiskinan. Secara garis besar, kemiskinan dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan alamiah

(Nasution, 2003). Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan tersebut banyak negara termasuk Indonesia kemudian memilih strategi pengentasan kemiskinan melalui strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth oriented strategy*).

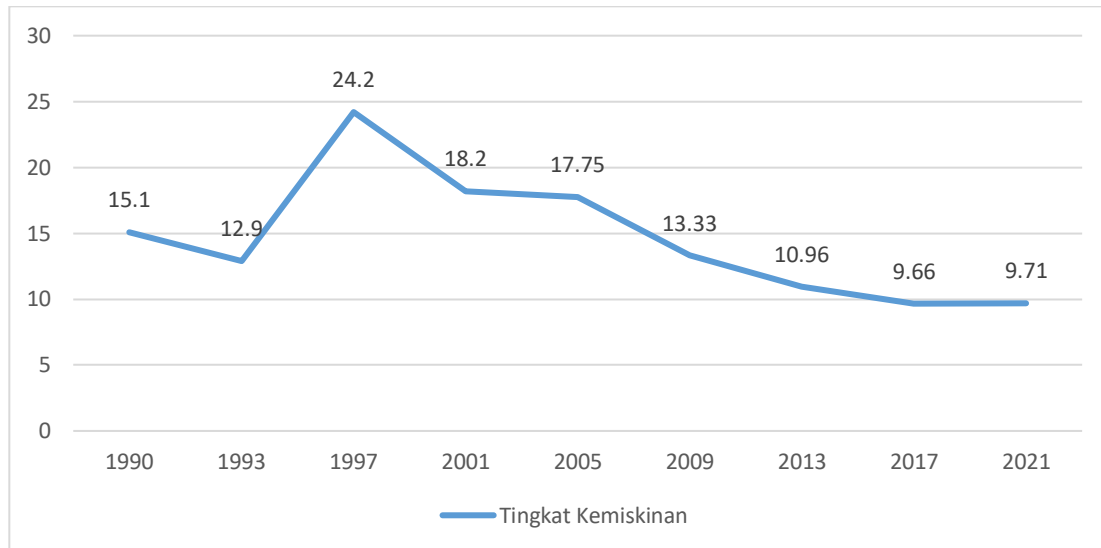
Kemiskinan masih menjadi agenda penting dunia internasional dan tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*). *Sustainable Development Goals/SDGs* merupakan tindak lanjut dari program Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGS*) yang secara resmi telah berakhir tahun 2015. Begitu pentingnya permasalahan yang terkait dengan kemiskinan sehingga SDGs menyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan dituntaskan. Bahkan sudi eksperimental yang dilakukan Banerjee and Duflo tentang masalah kemiskinan telah membawa mereka meraih penghargaan Nobel di bidang ekonomi tahun 2019.

Tujuan pertama SDGs secara garis besar berbicara tentang upaya untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Tujuan ini menggunakan berbagai sudut pandang untuk menggambarkan kemiskinan dan karenanya membutuhkan berbagai

tanggapan yang terkoordinasi. Untuk itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu dilaksanakan secara lebih komprehensif dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat serta dilakukan secara terpadu.

Pengukuran kemiskinan di Indonesia umumnya menggunakan kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need*). BPS menggambarkan kemiskinan sebagai rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan definisi kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dari definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi yaitu rendahnya pendapatan saja, akan tetapi harus dilihat dari banyak aspek yang saling terkait.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia menjadi agenda kebijakan penting karena secara moral Pemerintah mengemban tanggungjawab amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 1.1. : Tingkat Kemiskinan di Indonesia Sejak 1990 - 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indonesia memiliki pengalaman yang baik dalam hal pemberantasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia pernah turun drastis dari 40,1 persen di tahun 1976 menjadi 11,3 persen pada tahun 1996. Namun, pada saat terjadi krisis dan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan naik kembali menjadi 24,2 persen pada tahun 1999 (lihat Gambar 1.1). Selanjutnya angka kemiskinan relatif stabil di angka belasan hingga Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat momentum pada tahun 2017, dimana untuk pertama kalinya tingkat kemiskinannya menjadi 9,66 persen.

Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi pada dasarnya hasil yang diperoleh tidak selalu sama. Hal ini tergantung pada tingkat pengaruhtivitas program dan jumlah penduduk yang menjadi penghalang dalam upaya

pemberantasan kemiskinan. Saat ini, masih dapat dijumpai daerah yang menjadi kantung-kantung kemiskinan dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang tinggi, terutama di Indonesia bagian Timur. Fakta menunjukkan bahwa, meskipun berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan dana yang besar tetapi sebagian masyarakat masih tetap berada dalam kondisi kemiskinan.

Kemiskinan sendiri merupakan akibat dari kurangnya kesempatan kerja dengan tingkat upah yang tidak berada pada tingkat yang layak, mendorong pengangguran terbuka, setengah pengangguran dan penduduk miskin untuk menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri baik melalui jalur legal maupun melalui jalur illegal (Sidauruk, 2012)

Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak secara otomatis berdampak terhadap menurunnya tingkat kemiskinan di suatu negara. Sementara pada tahun 1960-an, pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu diringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan. Dalam program pembangunan pengentasan kemiskinan, selalu ada proses komunikasi ekonomi harus berfokus untuk mengurangi mekanisme yang membuat keluarga, daerah dan bahkan Negara secara keseluruhan terus berada dalam perangkap kemiskinan yakni ketika kemiskinan di masa lalu menyebabkan kemiskinan di masa depan dan menghasilkan strategi paling

pengaruhatif untuk melepaskan diri dari perangkap itu Todaro (2006), yang sering disebut dengan sosialisasi melalui berbagai saluran informasi Ilmu pembangunan. Menurut Kuncoro (2006), suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang dicapai sebelumnya.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka sebuah Negara dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa semakin meningkatnya produksi Negara tersebut, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cepat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dapat mengurangi kemiskinan di suatu Negara.

Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi terciptanya pembangunan manusia. Melalui pembangunan ekonomi akan dapat ditingkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk dengan penciptaan kesempatan kerja. Menurut Todaro (2006), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multi dimensi yang mencakup berbagai berbagai perubahan dasar atau struktur sosial. Strategi pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan output dari sektor pertanian, penciptaan lapangan kerja dan menuntaskan kemiskinan. Seperti yang kita ketahui, tingginya angka pengangguran, masalah ledakan penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai masalah lainnya

menjadi salah faktor utama rendahnya taraf hidup penduduk di negara kita. Seiring dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang berusaha mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama pembangunan mereka. Namun pada kenyataannya, banyak negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi namun menghasilkan tingkat kemiskinan yang tinggi pula, Anwar (2017)

Pembangunan suatu negara dikatakan berhasil ditentukan oleh berbagai faktor yang dimiliki masing-masing negara, salah satunya ketersediaan sumberdaya modal dan sumberdaya manusia (Anwar, 2012). Adanya sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan menentukan seberapa besar peran pemerintah dalam proses pembangunan tersebut, serta kebijakan yang dilakukan.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor (Arsyad, 2010). Pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baguspun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin njika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataan.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peranan para pelaku ekonomi, yakni pemerintah yang berperan dengan kebijakan publik dan fiskal, swasta yang berperan dalam pengembangan investasi, serta masyarakat itu sendiri yang dapat berperan sebagai input dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian, serta investasi dalam pembangunan dapat dinyatakan pada nominal yang terdapat dalam APBN. Pihak swasta dalam perkembangan ekonomi juga memberikan kontribusi positif, yakni dengan melakukan investasi yang biasa dikenal dengan *private investment*.

Dampak utang luar negeri pemerintah dan swasta dalam pertumbuhan ekonomi banyak dipertanyakan orang. Beberapa pengalaman dan bukti empiris juga telah menunjukkan hubungan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi, menurut ekonom Ben Friedman dalam bukunya "*Day of Reckoning*" berdampak negatif pada pertumbuhan karena utang luar negeri telah mendorong pemerintah untuk terlalu membebani generasi masa depan ketika menetapkan pengeluaran pemerintah dan pajak jangka panjang. Penelitian tersebut didukung oleh Pramasty (2014) tingkat utang luar negeri yang tinggi bisa menimbulkan risiko pelarian modal dan mengurangi pengaruh negara di seluruh dunia. Namun demikian, sejumlah penelitian juga menolak kesimpulan itu. Utang luar negeri juga merupakan bagian dari investasi, seharusnya berdampak positif pada pertumbuhan. Menurut penelitian Waluyo (2006) utang luar negeri dipandang mempunyai dampak positif pada

pertumbuhan ekonomi. Aliran utang luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik.

Jika utang tidak dikelola dengan baik untuk membuka lapangan kerja dan investasi, maka utang dapat memberatkan keuangan negara dalam hal pembayaran utang dan bunga utang yang harus dibayar oleh pemerintah. utang yang membengkak mengakibatkan *fiskal space* berkurang (Kuncoro, 2011). UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 12 Ayat 3, dimana defisit anggaran Indonesia dibatasi maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman maksimal enam puluh persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara dampak kebijakan fiskal pada pertumbuhan ekonomi diharapkan selalu positif, namun dalam teori kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya peningkatan sumber pajak yang sebagai sumber keuangan utama pemerintah, maka mengakibatkan peningkatan defisit anggaran (Anwar, 2012). Kebijakan fiskal dari sisi permintaan (*demand side*), menurut kaum klasik menyimpulkan bahwa dalam defisit anggaran yang dibiayai dengan pengurangan pajak di masa sekarang atau menambah utang luar negeri dapat meningkatkan kekayaan pelaku ekonomi yang hidup di masa sekarang. Peningkatan kekayaan itu akan meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan, sehingga utang luar negeri yang permanen dapat menyebabkan investasi

swasta menurun (*crowding-out*). Kelompok Keynesian mengasumsikan, defisit anggaran dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta konsumsi pada giliran berikutnya. Defisit anggaran yang dibiayai dengan utang membuat beban pajak pada masa sekarang relatif menjadi lebih ringan dan menyebabkan peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan (Kopcke, 2006).

Pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan investasi di sektor publik, namun pada kenyataannya terdapat masalah, yaitu langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi di jalur yang tidak produktif dari masyarakat. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal yang berasal dari pemerintah, sehingga diberikan kebijakan adanya investasi swasta dengan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri yang disebut PMDN dan PMA. Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Mankiw, 2007).

Hasil survey World Economic Forum (WEF) tahun 2007, salah satu dampak positif dari kehadiran penanaman modal asing (PMA) di Indonesia selama era orde baru adalah pertumbuhan PDB yang pesat, yakni rata-rata per tahun antara 7% hingga 8% yang membuat Indonesia termasuk negara di ASEAN dengan pertumbuhan yang tinggi. Proporsi investasi PMA dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) serta menurunnya pertumbuhan investasi di Indonesia tidak berarti pembangunan ekonomi berjalan lambat dan

begitu pula sebaliknya, karena yang terpenting bukan besarnya investasi dalam nilai uang atau jumlah proyek, tetapi efisiensi dari investasi tersebut.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dalam berbagai bentuk (Rizky, 2016). Peranan PMDN yaitu menutupi *gap* devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan dengan memperbesar devisa melalui ekspor produksi Indonesia ke luar negeri, sehingga diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan investasi dan penanaman modal asing (PMA) pada khususnya di Indonesia, didorong oleh stabilitas politik dan sosial, kepastian hukum, dan kebijakan ekonomi yang kondusif terhadap kegiatan bisnis di dalam negeri, yang semua ini sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga saat ini sulit sekali tercapai sepenuhnya.

Modal dalam negeri mampu mengurangi kekurangan tabungan dan melalui pemasukan peralatan modal dan bahan mentah, dengan demikian menaikkan laju pemasukan modal. Kenyataannya, perkembangan modal dalam negeri belum berkembang dalam pemanfaatan kekayaan alam yang melimpah dan diolah dengan baik. Pemanfaatan kekayaan alam membuat pemerintah melakukan suatu bidang usaha atau semacamnya yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan cara penggabungan faktor-faktor produksi, namun investasi atau penanaman modal tergantung dari daya tarik daerah,

iklim yang sehat, kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal (Zainuddin, 2009). Dalam survey WEF (2007) menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi pengusaha di Indonesia berturut-turut adalah masalah infrastruktur yang buruk, birokrasi yang tidak efisien, akses dana terbatas, kebijakan yang tidak stabil dan perpajakan.

Swasono (1993), memberi pengertian kesempatan kerja adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah di duduki (employment) dan masih lowong (vacancy). Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kemudian kebutuhan tenaga kerja yang datang misalnya dari perusahaan swasta atau BUMN dan departemen-departemen pemerintah. Adanya kebutuhan tersebut berarti adanya kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Dengan demikian kesempatan kerja (employment), yaitu kesempatan kerja yang sudah di duduki.

Menurut Tambunan (2003), besarnya kesempatan kerja tergantung pada beberapa faktor, diantaranya pertumbuhan output, tingkat upah dan harga-harga dari faktor produksi lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan output dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja dapat digambarkan lewat hubungan antara pasar barang dengan pasar tenaga kerja, dimana melalui mekanisme pasar terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja, rumah tangga menawarkan jasanya dan mendapatkan harga (gaji).

Dimensi masalah kesempatan kerja memang cukup rumit, bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan pekerjaan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Pada dasawarsa yang lalu, masalah pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan *output* industry. Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh “terbatasnya permintaan” tenaga kerja, yang selanjutnya semakin di ciutkan oleh factor-faktor eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada gilirannya telah mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industry, tingkat upah, dan akhirnya penyedia lapangan kerja (Todaro, 2006).

Kesempatan kerja akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia jika lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau setara dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Salah satu mekanisme pokok untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah dengan memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok penduduk miskin (Arsyad, 2010).

Selanjutnya, baik kesempatan kerja maupun investasi dan pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh kebijakan ekonomi yang terdiri atas kebijakan

moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan pendapatan. Berdasarkan sejumlah teori ekonomi dinyatakan bahwa investasi merupakan kunci dan pendorong utama terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun investasi sendiri merupakan variable ekonomi turunan yang selaras dengan teori dependensi dimana investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja tergantung (*depend*) pada kebijakan ekonomi (Nugroho, 2008)

Banyak negara tidak hanya menghadapi masalah kemerosotan dalam ketimpangan relatif, tetapi juga masalah kenaikan dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran. Besarnya dimensi kemiskinan tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau konsumsinya berada di bawah tingkat minimum yang sudah ditetapkan. Penduduk miskin biasanya menghadapi masalah utama tentang terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan wanita, serta adanya perbedaan upah.

Apabila permintaan konsumsi rumah tangga di pasar barang meingkat dan terjadilah pertumbuhan output, apabila disemua pasar terjadi peningkatan output, maka secara agregat terjadi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong adanya pertumbuhan kesempatan kerja. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan kesempatan kerja.

Tumbuhnya kegiatan ekonomi akan membuka lapangan pekerjaan, memberikan nilai tambah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Prasetyia, 2012). Untuk melakukan proyek-proyek pembangunan dengan pengeluaran pemerintah membutuhkan jasa tenaga kerja, dengan demikian pengangguran dapat dikurangi. Semua kebutuhan tersebut disediakan oleh masyarakat (pengusaha) yang pastinya menggunakan tenaga kerja. Berkaitan dengan kebijakan pengembangan industri nasional, pemberian insentif memiliki manfaat yang strategis. Pemberian fasilitas perpajakan akan meningkatkan efisiensi, daya saing dan ekspor produk industri. Kehilangan penerimaan negara dari pengurangan pajak dapat dikompensasi melalui penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kemandirian ekonomi.

Setiap perubahan dalam jumlah uang beredar akan berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di berbagai sektor, dengan demikian pengelolaan terhadap jumlah uang beredar harus selalu dilakukan dengan hati-hati. Menurut Iswandoro (1997), uang beredar adalah keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan resmi baik oleh bank sentral berupa uang kartal, maupun uang giral dan uang kuasi (tabungan, valas, deposito). Sementara menurut Sukirno (2000), uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah

dengan uang giral dalam bank-bank umum. Jumlah uang yang tersedia disebut suplai uang (Money Supply).

Dalam perekonomian yang menggunakan uang komoditas suplai, uang adalah jumlah dari komoditas itu. Dalam perekonomian yang menggunakan uang atas unjuk, seperti sebagian perekonomian dewasa ini, pemerintah mengendalikan money supply. Peraturan resmi memberi pemerintah hak untuk memonopoli percetakan uang. Tingkat pengenaan pajak (taxation) dan tingkat pembelian pemerintah merupakan instrumen kebijakan pemerintah, begitu pula suplai uang kontrol atas suplai yang disebut kebijakan moneter (Monetary Policy) (Mankiw, 2007). Setiap perubahan dalam jumlah uang beredar (JUB) akan berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di berbagai sektor, dengan demikian pengelolaan terhadap jumlah uang beredar harus selalu dilakukan dengan hati-hati.

Inflasi merupakan kenaikan di dalam tingkat harga umum (Samuelson, 2004). Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya inflasi antar lain penurunan nilai tukar mata uang, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang, bertambahnya uang beredar, dan lain sebagainya.

Inflasi yang merupakan variabel makro ekonomi selain pertumbuhan dan pengangguran semestinya mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah dalam hal menjaga tingkat kestabilannya. Setelah dahsyatnya goncangan krisis finansial (1998) yang merembet pada krisis kepercayaan, ekonomi Indonesia mulai bergerak dan bangkit kembali.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka judul penelitian ini: Pengaruh Utang Luar Negeri, Investasi dan Jumlah Uang Beredar terhadap Kesempatan Kerja dan Kemiskinan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah utang luar negeri berpengaruh terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia?
3. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia?

4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja di Indonesia?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesempatan kerja di Indonesia?
6. Apakah kesempatan kerja berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui Pengaruh Utang Luar Negeri, Investasi dan Jumlah Uang Beredar terhadap Kesempatan Kerja dan Kemiskinan di Indonesia. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pengaruh utang luar negeri terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia.

3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesempatan kerja di Indonesia.
6. Untuk menganalisis pengaruh kesempatan kerja terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka secara umum kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh utang luar negeri, investasi dan jumlah uang beredar terhadap kesempatan kerja dan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam rangka mengambil keputusan kebijakan tentang kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Dari uraian di atas, diharapkan penelitian ini secara khusus dapat memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Sebagai karya akademik, hasil kajian pada penelitian ini diharapkan menjadi suatu bentuk kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan konsep dan pengembangan teori dalam ilmu ekonomi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ataupun referensi pembandingan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang bermaksud ingin melakukan penelitian yang terkait dengan utang luar negeri, investasi, jumlah uang beredar, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kemiskinan di Indonesia.

1.4.3. Kegunaan Kebijakan

Selain kedua kegunaan yang telah dikemukakan sebelumnya, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program yang terkait dengan utang luar negeri, jumlah uang beredar, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan investasi, kesempatan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh utang luar negeri, investasi dan jumlah uang beredar terhadap kesempatan kerja dan kemiskinan di Indonesia. Data yang diambil yaitu; data-data tentang utang luar negeri, investasi, jumlah uang beredar, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kemiskinan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis dan Konsep Utang Luar Negeri

Utang merupakan salah satu alternatif yang dipilih sebagai sumber pembiayaan karena adanya kebutuhan yang perlu diselesaikan segera. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang luar negeri dimaksudkan sebagai pengeluaran pembangunan yang berasal dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Dana luar negeri yang diperoleh kemudian digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan di berbagai sektor kehidupan negara. Dapat dikatakan bahwa utang luar negeri pemerintah Indonesia hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam pengeluaran pembangunan maupun total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun semua utang luar negeri pemerintah tetap dan terus saja semakin besar setiap tahunnya.

Tingginya utang luar negeri disebabkan terutama oleh tiga jenis defisit yaitu: 1) Defisit transaksi berjalan yaitu ekspor lebih sedikit dari pada impor; 2) Defisit investasi yaitu dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi didalam negeri lebih besar dari pada tabungan nasional atau domestik; 3) Defisit fiskal yaitu kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mengendalikan pembelanjaan lebih besar dari pada pendapatan.

Dari faktor-faktor tersebut, defisit transaksi berjalan sering disebut di dalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya utang dari banyak negara berkembang. Besarnya defisit transaksi berjalan melebihi surplus neraca modal (Capital Account) mengakibatkan defisit neraca pembayaran (Balance Of Payment) yang berarti juga cadangan devisa (International Reserves and Foreign Currency Liquidity) berkurang. Apabila saldo transaksi berjalan setiap tahun negatif, maka Cadangan Devisa dengan sendirinya akan habis jika tidak ada sumber-sumber lain, misalnya modal investasi dari luar negeri.

Sejak pemerintahan Orde Baru hingga saat ini tingkat ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri tidak pernah menyusut, bahkan mengalami akselerasi yang pesat sejak krisis ekonomi 1997-1998 karena periode tersebut pemerintah Indonesia terpaksa membuat utang baru dalam jumlah yang besar dari IMF untuk membiayai pemulihan ekonomi. Pada masa pemerintahan orde baru, utang dibutuhkan terutama untuk membiayai defisit investasi, defisit investasi, defisit TB dan beberapa komponen dari sisi pengeluaran pemerintah didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian pinjaman atau pinjaman luar negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman

dan atau hibah luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman luar negeri bank sentral adalah pinjaman yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang diperuntukkan dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Pinjaman luar negeri swasta adalah pinjaman luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan atau rupiah berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya, kas dan simpanan milik bukan penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Pinjaman luar negeri swasta meliputi pinjaman bank dan bukan bank.

Pada awal perkembangan suatu negara wajar bila dibutuhkan dana yang sangat besar bagi investasi dan pertumbuhan ekonominya, jika tabungan dalam negeri belum cukup maka cara termudah yaitu dengan melakukan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri berdampak positif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi di situasi tertentu. Pinjaman luar negeri akan menimbulkan masalah jika dana tersebut tidak diinvestasikan pada kegiatan produktif yang menghasilkan tingkat pengembalian devisa yang tinggi untuk menutupi pembayaran bunga (Fairuz, 2010). Elbadawi et. al (1997) dalam studi telah membuktikan bahwa akumulasi pinjaman luar negeri berdampak negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pada tingkat akumulasi utang yang besar ternyata justru akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Hal ini dikarenakan dalam jangka panjang utang akan lebih besar daripada kemampuan membayar negara debitur, biaya dari bunga utang diperkirakan akan mendesak investasi domestik dan investasi asing, yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi (Pattilo, 2002). *Debt overhang hipotesis* menunjukkan bahwa utang akumulasi bertindak sebagai pajak dimasa depan output, mengecilkan produktif rencana investasi sector swasta dan usaha penyesuaian dipihak pemerintah. Jadi, bahkan setelah beberapa perbaikan dalam produksi ekonomi, dapat menyimpulkan pembayaran utang yang lebih tinggi, karena utang luar negeri bertindak seperti pajak dimasa depan produksi dan ekspor. “debt overhang” teori yang menunjukkan bahwa jika ada beberapa kemungkinan dimasa depan utang akan lebih besar daripada kemampuan pembayaran negara. Sachs (1986) berpendapat bahwa overhang utang luar negeri memainkan peran penting dalam utang negara. Jadi, debt overhang adalah salah satu alasan utama untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam hutang negara.

Setidaknya terdapat masalah besar yang ditimbulkan utang luar negeri tersebut (Yustika, 2000). Utang luar negeri (ULN) tidak datang dalam wujud uang, melainkan sebagian besar justru dalam bentuk barang atau teknologi. Dengan keadaan seperti ini, penggunaan ULN menjadi tidak

fleksibel, karena produk atau teknologi tersebut jelas hanya bisa digunakan untuk program-program tertentu saja. Mekanisme itu bisa terjadi mengingat prosedur pemberian utang adalah melalui seleksi proposal yang berisi program-program yang sudah direncanakan, dan bila sudah disetujui maka kebutuhan program itu diwujudkan dalam bentuk barang atau teknologi, bukan uang. Ini jelas berbeda konsekuensinya apabila utang tersebut dirupakan dalam wujud uang, karena dengan begitu pemakaiannya bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan riil yang berkembang dalam pelaksanaan program.

Pada dasarnya utang luar negeri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur yaitu akumulasi modal dan pertumbuhan total faktor produktifitas (Patillo, 2002). Utang luar negeri dalam jumlah yang *reasonable* dapat memberikan kontribusi yang positif pada pertumbuhan ekonomi. Model tradisional neo klasik membolehkan mobilitas modal atau kemampuan suatu negara untuk meminjam atau meminjamkan modal. Negara yang meminjam utang luar negeri untuk investasi dengan *marginal product of capital* lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar akan memperoleh insentif (Patillo, 2002). Utang luar negeri akan menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara kalau jumlahnya berlebihan.

Menurut pandangan klasik atas utang luar negeri, pemotongan pajak yang didanai oleh utang mendorong pengeluaran konsumen dan mengurangi

tabungan nasional. Kenaikan pengeluaran konsumen ini menyebabkan permintaan agregat yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi dalam jangka pendek, tetapi hal itu juga menyebabkan persediaan modal yang lebih kecil dan pendapatan yang lebih rendah, sehingga utang luar negeri akan lebih besar dalam jangka panjang (Mankiw, 2007).

Menurut pandangan Ricardian atas utang pemerintah, pengeluaran konsumen tidak meningkatkan keseluruhan sumber daya konsumen dan pemotongan pajak. Dalam jangka pendek utang luar negeri meningkatkan pendapatan saat ini, dalam jangka panjang tidak mengubah pendapatan atau konsumsi masa depan. Pandangan tersebut akan membebani generasi masyarakat masa depan (Mankiw, 2007). Kaum Ricardian dengan teorinya *Ricardian Equivalence (RE)* berpendapat bahwa defisit anggaran yang di biayai utang luar negeri tidak akan mempunyai pengaruh apa-apa terhadap perekonomian. Teori ini berasal *David Ricardo's Funding Sistem* dan dikemukakan kembali oleh Barro, sehingga sering diberi nama Ricardo-Barro Proposition. Hal ini terjadi karena efek pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan utang pemerintah harus dibayar oleh pemerintah pada masa yang akan datang dengan kenaikan pajak, sehingga masyarakat akan mengurangi konsumsinya pada saat sekarang untuk memperbesar tabungan, selanjutnya digunakan untuk membayar kenaikan pajak pada masa yang akan datang.

Kelompok Keynesian adalah kaum Keynesian yang berpendapat bahwa defisit fiskal yang di biayai utang luar negeri mempengaruhi perekonomian. Paham ini melihat kebijakan peningkatan anggaran belanja yang dibiayai dengan utang luar negeri akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi akibat naiknya permintaan agregat sebagai pengaruh lanjut dari terjadinya akumulasi modal. Menurut kaum Keynesian, defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, dan konsumsi pada giliran berikutnya.

Defisit anggaran yang dibiayai utang, yang berarti beban pajak pada masa sekarang relatif menjadi lebih ringan, akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan. Peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan akan meningkatkan konsumsi dan sisi permintaan secara keseluruhan. Jika perekonomian belum dalam kondisi kesempatan penuh, peningkatan sisi permintaan akan mendorong produksi dan selanjutnya peningkatan pendapatan nasional. Pada periode selanjutnya, peningkatan pendapatan nasional akan mendorong perekonomian karena defisit anggaran meningkatkan konsumsi dan tingkat pendapatan sekaligus, tingkat tabungan dan akumulasi kapital juga akan meningkat. Menurut kaum Keynesian secara keseluruhan, defisit anggaran dan utang dalam jangka pendek akan menguntungkan perekonomian dengan adanya pertumbuhan ekonomi.

2.2. Tinjauan Teoritis dan Konsep Investasi

Teori Investasi adalah teori permintaan modal. Investasi adalah arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik atau dengan kata lain investasi adalah jumlah yang dibelanjakan sektor usaha untuk menambah stok modal dalam periode tertentu. Sementara Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik mengartikan investasi sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (*benefit*) pada masa-masa yang akan datang.

Investasi merupakan unsur pertumbuhan ekonomi yang paling sering berubah. Ada tiga bentuk pengeluaran investasi yaitu: investasi tetap bisnis, investasi tetap residensial dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan, investasi residensial adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan (Mankiw, 2007). Selain itu, investasi dapat dibedakan atas investasi financial dan investasi non-financial. Investasi financial lebih ditujukan kepada investasi dalam bentuk pemilikan instrumen financial seperti penyertaan, pemilikan saham, obligasi dan sejenisnya. Sedangkan investasi non-financial dalam bentuk investasi fisik (*capital* dan barang modal), termasuk pula *inventory* (persediaan).

Menurut Keynes, investasi adalah kenaikan dalam modal yang tersedia, tetapi kenaikan dalam proses produksi akan menaikkan penawaran agregate yang diperlukan untuk full employment. Lebih lanjut Keynes mengemukakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh tingkat pengeluaran seluruh masyarakat. Oleh karena itu, jika volume investasi yang diperlukan tidak terpenuhi maka permintaan agregate akan turun lebih rendah daripada harga penawaran agregate. Akibatnya pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut terjembatani. Jadi perubahan antara pekerjaan dan pendapatan sebagian besar akan tergantung pada efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Kenaikan investasi akan mengakibatkan kenaikan pekerjaan, akan tetapi ini bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan mengkonsumsi turun. Tetapi sebaliknya kenaikan kecenderungan mengkonsumsi dapat mengakibatkan peningkatan kesempatan kerja tanpa kenaikan investasi (Jhingan, 2000).

Sementara Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi yaitu: 1). Menciptakan pendapatan; 2). Memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock capital. Kedua hal ini sebagai dampak dari adanya permintaan dan penawaran investasi. Karena itu selama investasi berlangsung, pendapatan

nyata dan output akan senantiasa membesar. Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat equilibrium pendapatan pada tingkat full employment dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas modal meningkat. Karena jika tidak, setiap perbedaan keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas yang menganggur.

Hal ini memaksa para investor membatasi pengeluarannya sehingga pada akhirnya akan berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu berupa menurunnya pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya. Jadi, apabila pekerjaan ingin dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar.

Dalam konteks lain, penciptaan investasi juga membawa pengaruh perkembangan suatu daerah. Dampak tersebut disebut dengan spread effect, yaitu apabila suatu investasi yang ditanamkan di dalam suatu daerah membawa pengaruh positif bagi daerah lainnya. Seperti timbulnya industri-industri perlengkapan atau penunjang bagi industri utama di daerah pusat investasi.

Dari berbagai macam pendapat seperti yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang modal. Besar kecilnya investasi

yang ditanamkan dalam suatu perusahaan tidaklah secara mutlak menjamin terciptanya output atau produktivitas yang tinggi, meskipun investasi perusahaan kecil, tetapi baik dalam pengelolaannya dan ini merupakan langkah yang terbaik dalam menuju tingkat efisiensi kerja sehingga diharapkan produktivitasnya meningkat.

Dari teori makro Keynes, keputusan apakah suatu investasi dilaksanakan atau tidak tergantung pada perbandingan antara besarnya keuntungan yang diharapkan suatu pihak dengan biaya pengguna dana atau tingkat bunga dilain pihak. Dengan demikian keputusan untuk melakukan investasi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu: 1). tingkat bunga yang mempengaruhi biaya barang modal; 2). keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut (*marginal efficiency of investment*).

Pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap. Oleh karena itu diperlukan pelengkap usaha yang sungguh-sungguh untuk menggerakkan dan investasi yang bersumber dari masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa dari hasil ekspor. Pengerahan investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat sehingga peranan bantuan luar negeri itu semakin dan akhirnya mampu membiayai seluruh pembangunan. Investasi swasta sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi.

Investasi swasta membantu dalam industrialisasi dalam membangun modal overhead ekonomi dan dalam menciptakan kesempatan kerja yang luas. Peningkatan investasi yang ditanamkan dalam suatu industri akibat meningkatnya permintaan akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja dalam industri tersebut.

2.3. Tinjauan Teoretis dan Konsep Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar (JUB) atau penawaran uang (*money supply*), adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. JUB adalah total persediaan uang yang beredar luas di masyarakat. JUB dapat mencakup uang kertas, uang logam dan saldo yang disimpan dalam rekening giro dan tabungan, dan pengganti uang lainnya.

Teori Kuantitas Uang, menurut paham klasik, uang tidak mempunyai pengaruh terhadap sektor riil, tidak ada pengaruhnya terhadap tingkat bunga, kesempatan kerja atau pendapatan nasional. Pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah dan kualitas dari pada tenaga kerja, jumlah daripada modal yang dipakai serta teknologi.

Pengaruh uang hanyalah terhadap harga barang. Bertambahnya uang beredar akan mengakibatkan kenaikan harga saja. Jumlah output yang dihasilkan tidak berubah. Inilah yang sering disebut dengan *classical dichotomy*, merupakan pemisahan sektor moneter dengan sektor riil.

Teori Kuantitas Uang

Teori kuantitas uang tidak muncul begitu saja, melainkan turun-temurun mulai dari David Ricardo sampai dengan Irving Fisher. Jika dilihat lebih lanjut memang terjadi perbedaan antara teori kuantitas uang dari ekonom tersebut.

Untuk lebih mempermudah pemahaman akan perbedaan teori kuantitas tersebut, pertama-tama akan dibahas mengenai teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh David Ricardo yaitu $M = k \times P$. Dalam teori ini dijelaskan bahwa M merupakan jumlah uang beredar, k adalah konstanta, dan P adalah tingkat harga barang. Dari rumusan tersebut bisa diartikan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah uang beredar maka akan memberikan pengaruh yang signifikan pada turunnya nilai uang. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika uang yang beredar semakin banyak dan barang yang beredar jumlahnya tetap, sehingga secara otomatis akan meningkatkan permintaan terhadap barang yang akan berakibat pada kenaikan harga uang.

Teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher adalah sebagai upaya untuk memperbaiki kuantitas uang yang dikemukakan terlebih dahulu oleh David Ricardo. Dalam teori kuantitas uang Irving Fisher, dikemukakan bahwa kenaikan harga barang tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, melainkan juga kecepatan dari peredaran uang tersebut. Sehingga ketika kecepatan uang beredar tinggi, hal tersebut akan

berpengaruh pada kenaikan harga barang, sedangkan ketika kecepatan peredaran uang rendah maka yang terjadi adalah sebaliknya yaitu terjadi penurunan harga barang.

Untuk lebih mempermudah teori yang disampaikan oleh Irving Fisher didapatkan rumus $M \times V = P \times T$. Berdasarkan rumus ini bisa diartikan bahwa M merupakan jumlah uang beredar, V merupakan kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga secara umum, dan T merupakan volume perdagangan. Sebagaimana yang dijelaskan di awal, bahwa kecepatan peredaran uang sangat memengaruhi kenaikan harga barang.

Selain itu kehebatan lain dari teori kuantitas uang oleh Irving Fisher adalah formula yang membedakan antara peredaran uang kartal dan giral yakni $(M \times V) + (M1 \times V1) = P \times T$. Dari formula ini M1 adalah jumlah peredaran uang giral, V1 adalah kecepatan peredaran uang giral.

Teori Cambridge (Marshall Equation), memandang persamaan teori kuantitas uang Irving Fisher dengan sedikit berbeda. Ia tidak menekankan pada perputaran uang (velocity) dalam suatu periode, melainkan pada bagian dari pendapatan (GNP) yang diwujudkan dalam bentuk uang kas. Secara matematis sederhana, teori Marshall dapat ditulis sebagai berikut:

$$M = k Py$$

Di mana k adalah bagian dari GNP yang diwujudkan dalam bentuk uang kas, jadi besarnya sama dengan $1/v$. Marshall tidak menggunakan volume

transaksi (T) sebagai alat pengukur jumlah output, tetapi diganti dengan Y. Jadi T pada umumnya lebih besar dari pada Y, sebab dalam pengertian T termasuk juga total transaksi barang akhir dan atau setengah jadi yang dihasilkan beberapa tahun yang lalu. Sedang dalam GNP hanyalah mencakup barang akhir dan jasa yang dihasilkan pada tahun tertentu saja. Juga dalam GNP tidak termasuk barang setengah jadi.

Memandang persamaan saldo kas (*cash balance*) sebagai persamaan permintaan akan uang, maka apabila jumlah uang naik dua kali, harga juga akan naik dua kali sampai permintaan akan uang sama dengan jumlah uang. Apabila jumlah uang naik dua kali, maka masyarakat akan kelebihan uang yang dipegang. Mereka akan membelanjakan kelebihan uang ini sampai jumlah uang yang diinginkan untuk dipegang sama dengan jumlah uang yang ada. Ini terjadi apabila Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) telah naik dua kali.

Teori Penawaran Uang

Teori Penawaran Uang Tanpa Bank, teori ini menganggap seakan-akan perbankan tidak ada, walaupun ada tidak mempunyai pengaruh terhadap proses penciptaan uang. Teori yang paling sederhana adalah gambaran dari sistem standart emas, dimana emas adalah satu-satunya alat pembayaran. JUB naik-turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Jumlah uang

(emas) dapat turun apabila emas dikirim ke luar negeri untuk menutup defisit neraca pembayaran (impor), industri-industri yang menggunakan emas dalam proses produksinya menyedot emas yang ada. JUB (emas) naik apabila ada surplus neraca pembayaran atau karena produksi emas meningkat.

Uang beredar benar-benar ditentukan oleh proses pasar, sedangkan pemerintah, bank sentral atau perbankan tidak mempunyai pengaruh terhadap besarnya uang beredar. Contoh, suatu perekonomian tertutup yang menggunakan emas untuk alat pembayarannya. Dalam hal ini uang hanya akan bertambah apabila orang memproduksi emas. Sedangkan produsen emas akan memproduksi emas hanya apabila menguntungkan, yaitu apabila harga emas dipasaran lebih tinggi daripada biaya produksinya.

Sementara Teori Penawaran Uang Modern, merupakan teori yang digunakan dalam perekonomian modern dengan sistem standart kertas dan sebagai sumber terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter (pemerintah dan bank sentral) dan lembaga keuangan. Otorita moneter sebagai sumber penawaran uang inti dan lembaga keuangan sebagai sumber penawaran uang sekunder. Jumlah uang beredar (JUB) merupakan proses pasar, artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, dan bukan hanya pencetakan uang atau merupakan keputusan pemerintah saja. Apabila suatu waktu permintaan uang inti tidak sesuai dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan

“penyesuaian” berupa tindakan-tindakan (mengubah struktur/komposisi dari kekayaan) di sub pasar uang inti sehingga terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Demikian juga jika terjadi ketidakseimbangan di pasar uang sekunder. Kedua sub pasar ini harus mencapai keseimbangan secara bersama-sama.

Sebagai contoh, ketika pasar dalam posisi keseimbangan, pemerintah menambah penawaran uang inti kepada masyarakat (ada kenaikan gaji pegawai). Pertama: tambahan uang inti akan diterima masyarakat sebagai tambahan uang tunai (kartal). Hal ini dapat mengganggu keseimbangan karena masyarakat akan merasa terlalu banyak memegang uang tunai. Misalkan tindakan penyesuaian yang dilakukan masyarakat adalah dengan menyimpan kelebihan tersebut dalam rekening giro, maka berarti bahwa cadangan bank menjadi lebih besar. Kedua, Bank pada gilirannya merasa kelebihan cadangan (uang tunai), dan bank mungkin akan menanamkan kelebihan cadangan tersebut dengan membeli SBI. Dalam transaksi tersebut, bank menerima SBI dan BI menerima uang tunai. Kesimpulan: tambahan uang inti oleh pemerintah, kembali ke BI sebagai otoritas moneter. Uang kartal yang dipegang masyarakat tetap, tetapi ada tambahan uang giral, sehingga M1 bertambah.

2.4. Tinjauan Teoretis dan Konsep Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri. Sebaliknya, deflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus menerus atau terjadi peningkatan nilai uang. Inflasi merupakan fenomena moneter yang merupakan suatu proses kenaikan harga yaitu adanya kecenderungan bahwa harga meningkat secara terus menerus.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya inflasi antara lain penurunan nilai tukar mata uang (kurs), permintaan yang tinggi terhadap suatu barang dan bertambahnya jumlah uang yang beredar. Faktor yang lain adalah adanya kenaikan biaya produksi, ekspektasi dari masyarakat, dan karena faktor penyebab yang sifatnya campuran (mixed inflation).

Teori Kuantitas

Teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari: 1) jumlah uang yang beredar, dan 2). psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (expectations). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut: (a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (uang kartal atau uang giral). Penambahan jumlah uang ibarat “bahan bakar” bagi api inflasi.

Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab musabab awal terjadinya inflasi. (b) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang.

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan keadaan. Keadaan pertama, adalah bila masyarakat tidak atau belum mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam keadaan ini, sebagian besar dari penambahan jumlah uang yang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah likuiditasnya (memperbesar pos kas neraca anggota masyarakat). Ini berarti, sebagian besar dari penambahan jumlah uang tidak dibelanjakan untuk pembelian barang, berarti tidak akan ada kenaikan permintaan barang, yang berarti pula tidak akan ada kenaikan harga barang. Jika ada kenaikan harga, hanya relatif kecil. Misalnya, penambahan jumlah uang yang beredar sebesar 10%, hanya akan diikuti oleh kenaikan harga-harga sebesar 1%. Keadaan ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi masih baru mulai dan masyarakat masih belum sadar bahwa inflasi sedang berlangsung. Keadaan kedua, adalah keadaan di mana masyarakat mulai sadar adanya inflasi. Masyarakat mulai mengharapkan adanya kenaikan harga. Penambahan jumlah uang yang beredar, tidak lagi untuk menambah pos Kas-nya, tetapi untuk membeli barang (memperbesar pos aktiva barang-barang di dalam neraca). Hal ini akan menyebabkan meningkatnya permintaan barang. Akibat

selanjutnya adalah kenaikan harga barang. Dalam hal ini, penambahan jumlah uang yang beredar 10%, akan diikuti kenaikan harga-harga sebesar 10% pula. Keadaan ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi sudah berjalan cukup lama, dan masyarakat cukup waktu untuk menyesuaikan sikapnya terhadap situasi yang baru. Keadaan ketiga, adalah keadaan di mana inflasi telah terjadi lebih parah (*hyper inflation*). Dalam keadaan ini masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Masyarakat cenderung enggan memegang uang kas. Begitu menerima uang kas, masyarakat cenderung langsung membelanjakannya. Masyarakat memiliki harapan bahwa laju inflasi di bulan-bulan mendatang lebih besar dari laju bulan-bulan sebelumnya. Keadaan ini ditandai dengan makin cepatnya peredaran uang, dalam keadaan ini penambahan jumlah uang sebesar 10% misalnya, akan menyebabkan kenaikan harga-harga lebih besar dari 10%.

Inti dari teori kuantitas adalah, pertama, bahwa inflasi itu hanya bias terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Bila terjadi kegagalan panen misalnya, yang menyebabkan harga beras naik, tetapi apabila jumlah uang beredar tidak ditambah, maka kenaikan harga beras akan berhenti dengan sendirinya. Inti yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang.

Teori Keynes

Teori ini menyatakan, bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia sehingga timbul apa yang disebut dengan inflationary gap (celah inflasi).

Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan keinginan mereka menjadi permintaan efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah keinginannya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat ini, mungkin adalah pemerintah sendiri yang menginginkan bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan melakukan defisit anggaran belanja yang ditutup dengan mencetak uang baru. Golongan ini mungkin juga pihak swasta yang ingin melakukan investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit bank. Golongan ini bisa juga dari serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji para anggotanya melebihi kenaikan produktivitas

kerja buruh. Apabila permintaan efektif dari golongan-golongan masyarakat tersebut, pada harga-harga yang berlaku, melebihi jumlah maksimum barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka inflationary gap akan timbul dan akibatnya akan terjadi kenaikan harga-harga barang.

Dengan adanya kenaikan harga, sebagian dari rencana pembelian barang dari golongan-golongan tadi tentu tidak bisa terpenuhi. Pada periode berikutnya, golongan-golongan yang tidak bisa memenuhi rencana pembelian barang tadi, akan berusaha memperoleh dana lagi (baik dari pencetakan uang baru, kredit bank, atau kenaikan gaji). Tentunya tidak semua golongan tersebut berhasil memperoleh tambahan dana yang diinginkan. Golongan yang berhasil memperoleh tambahan dana lebih besar bisa memperoleh bagian dari output yang lebih banyak. Mereka yang tidak bisa memperoleh tambahan dan akan memperoleh bagian output yang lebih sedikit. Golongan yang kalah dalam perebutan ini adalah golongan yang berpenghasilan tetap atau yang penghasilannya tidak naik secepat kenaikan laju inflasi (pensiunan, PNS, petani, karyawan perusahaan yang tidak mempunyai serikat buruh). Inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan masyarakat. Inflasi akan berhenti jika permintaan efektif total tidak melebihi jumlah output yang tersedia.

Proses timbulnya inflationary gap, dapat diasumsikan bahwa semua golongan masyarakat bisa memperoleh dana pada tingkat harga yang

berlaku, untuk membiayai rencana pembelian barang. Misalnya, pemerintah memperbesar pengeluaran dengan mencetak uang baru. Dengan kenaikan harga ini, golongan masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi permintaannya karena jumlah barang yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan, sehingga yang terjadi hanya realokasi barang yang tersedia dari golongan lain dalam masyarakat ke sektor pemerintah. Seandainya pada periode berikutnya, golongan masyarakat lain bisa memperoleh dana untuk membiayai rencana pembeliannya dengan harga yang baru.

Apabila golongan masyarakat tetap berusaha memperoleh jumlah barang yang sama dan mereka berhasil memperoleh dana untuk membiayai rencana pembelian tersebut pada tingkat harga yang berlaku, maka inflationary gap akan tetap timbul pada periode selanjutnya. Dalam hal ini harga akan terus naik. Inflasi akan berhenti hanya bila salah satu golongan masyarakat tidak lagi (atau tidak bisa lagi) memperoleh dana untuk membiayai rencana pembelian barang pada harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi jumlah barang-barang yang tersedia.

Faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi (yang berlangsung lama). Menurut teori ini ada dua ketegaran dalam perekonomian yang bisa menimbulkan inflasi, yaitu: Ketegaran yang pertama berupa “ketidak elastisan” dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang

tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan oleh: (a). Harga di pasar dunia dari barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan (dibanding dengan harga-harga barang impor yang harus dibayar), atau sering disebut dengan istilah dasar penukaran (term off trade) semakin memburuk. Dalam hal ini sering dianggap bahwa harga barang hasil alam, yang merupakan barang ekspor dari negara sedang berkembang, dalam jangka panjang naik lebih lambat dari pada harga barang industri, yang merupakan barang impor Negara sedang berkembang, (b). Suplai atau produksi barang ekspor tidak responsif terhadap kenaikan harga (tidak elastis). Kelambanan pertumbuhan ekspor berarti pula kelambanan kemampuan untuk impor barang yang dibutuhkan (baik barang konsumsi maupun investasi). Akibatnya negara yang bersangkutan mengambil kebijakan pembangunan yang menekankan pada pengembangan produksi dalam negeri untuk barang-barang yang sebelumnya diimpor (import-substitution strategy) walaupun harus sering dengan biaya produksi yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih rendah. Biaya yang lebih tinggi menyebabkan harga produk menjadi lebih tinggi. Dengan demikian inflasi akan terjadi.

Ketegaran kedua berkaitan dengan “ketidak elastisan” dari suplai atau produksi bahan makanan. Pertumbuhan bahan makanan tidak secepat pertumbuhan penduduk dan penghasilan per kapita, sehingga harga bahan

makanan di dalam negeri cenderung naik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan di sektor industri untuk memperoleh kenaikan gaji/upah. Kenaikan upah berarti kenaikan biaya produksi, yang berarti kenaikan harga barang-barang produksi. Kenaikan barang-barang, mengakibatkan tuntutan kenaikan upah lagi. Kenaikan upah akan diikuti oleh kenaikan harga produk, dan seterusnya. Proses ini akan berhenti dengan sendirinya apabila harga bahan makanan tidak terus naik. Dalam praktek, proses inflasi yang timbul karena dua ketegaran tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri. Kedua proses tersebut saling berkaitan dan bahkan saling memperkuat satu sama lain.

Inti dari proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan pendapatan di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Kelompok-kelompok sosial ini misalnya orang-orang pemerintah sendiri, pihak swasta atau bias juga serikat buruh yang berusaha mendapatkan kenaikan gaji atau upah, hal ini akan berdampak terhadap permintaan barang dan jasa yang pada akibatnya akan menaikkan harga.

Teori Strukturalis

Teori ini biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi,

khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktural ini, penambahan produksi barang lebih lambat dibandingkan peningkatan kebutuhan masyarakat. Akibatnya penawaran (*supply*) barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat, sehingga harga barang dan jasa meningkat.

Dari ketiga teori yang dijabarkan di atas, teori inflasi yang sering digunakan dan cukup terkenal adalah teori kuantitas. Dalam teori kuantitas dikatakan bahwa inflasi sangat dipengaruhi jumlah uang yang beredar. Dalam kenyataannya, jumlah uang beredar itu sangat berpengaruh terhadap inflasi.

2.5. Tinjauan Teoretis dan Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai interaksi faktor-faktor tersebut satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999). Teori pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: 1). Teori-teori Klasik, mencakup Teori Pertumbuhan Adam Smith, David Ricardo dan Arthur Lewis. Perbedaan Teori Lewis dengan Teori-Teori Klasik Smith dan Ricardo terletak pada penekanan oleh Lewis pada aspek dualisme perekonomian yaitu adanya sektor modern dan sektor tradisional, yang masing-masing memiliki ciri ekonomi khusus. 2). Teori-teori Modern, yang

mencakup empat sub golongan yaitu: (a). Teori Pertumbuhan yang tumbuh dari Teori Makro Keynes (Keynesian). Dalam hal ini termasuk Teori Pertumbuhan Harrod-Domar, Kaldor. (b). Teori Pertumbuhan Neo Klasik, diawali terutama oleh Teori Robert Solow dan Trevor Swan. (c). Teori Pertumbuhan Optimum, Teori ini bertujuan mencari jalur pertumbuhan yang paling baik (optimum) bagi suatu perekonomian. Termasuk dalam hal ini Teori Dalil Emas dan Teori Jalan Raya. (d). Teori Pertumbuhan dengan Uang, Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari Teori Pertumbuhan Neo Klasik, tetapi dengan tambahan adanya uang di dalam perekonomian sebagai alat penyimpanan kekayaan. Teori pokoknya berawal dari karya James Tobin.

Di dalam ilmu ekonomi terdapat banyak teori tentang pertumbuhan. Teori tersebut dibangun oleh para ahli ekonomi dan banyak dipengaruhi oleh keadaan pada waktu mereka masih hidup. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: 1). jumlah penduduk; 2). jumlah stok barang modal, 3). luas tanah dan 4). kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno 1997). Lebih lanjut Sukirno mengatakan, suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi suatu masyarakat adalah lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya, dengan kata lain jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah semua yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara/daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Kedua definisi tersebut pada dasarnya adalah sama yaitu menitik beratkan pada pendapatan perkapita. Umumnya perkembangan ekonomi berarti pula pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2000).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. Menurut Smith dalam Arsyad (1999), mengatakan bahwa sumberdaya alam tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi atau masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Djojohadikusumo (1994), memberikan batasan tentang pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan tiga ciri pokok yaitu adanya laju pertumbuhan pendapatan per kapita dalam arti nyata (riil), persebaran (distribusi) angkatan kerja menurut sektor kegiatan yang menjadi sumber nafkahnya serta pola persebaran penduduk dalam masyarakat.

Teori pertumbuhan Solow sering disebut sebagai teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik yang melihat pertumbuhan dari segi penawaran (faktor produksi). Teori Solow merupakan pengembangan dari teori Harrord-Domar

dengan menganggap rasio kapital-output bukan sebagai eksogen tetapi sebagai adjusting variable yang akan mendorong pertumbuhan pada keadaan steady state.

Model pertumbuhan eksogen Solow menyatakan bahwa akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Solow mengembangkan persamaan-persamaan dari Harrod-Domar dengan kemungkinan adanya substitusi antara labor dan capital dengan memegang prinsip diminishing return atas satu faktor produksi. Saat keseimbangan jangka panjang (steady state) pertumbuhan pendapatan per kapita akan tumbuh dengan tingkat yang sama yaitu nol.

Teori Solow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi tenaga kerja, akumulasi modal dan teknologi. Disini perekonomian akan tetap mengalami full employment. Selanjutnya rasio modal-output bisa berubah, oleh karena itu untuk menciptakan output tertentu dapat menggunakan modal yang berbeda dengan bantuan tenaga kerja yang berbeda pula. Apabila dalam suatu perekonomian modal yang dibutuhkan lebih banyak aka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, begitu juga sebaliknya.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan bertujuan menentukan usaha pembangunan yang berkelanjutan dengan tidak menghabiskan sumber daya

alam. Teori dan model pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan panduan konsep pembangunan, di mana hal ini dibahas dalam teori pertumbuhan dan pembangunan yang berusaha menganalisa secara kritikal dengan melihat kesesuaiannya dalam konteks negara. Walaupun tidak semua teori atau model dapat digunakan, namun berbagai pendapat mengenai peranan faktor pengeluaran termasuk buruh, tanah, modal dan pengusaha dapat menjelaskan penyebab awal tidak terlaksananya pembangunan dalam sebuah negara. Pada tahap awal, pendapatan per kapita menjadi alat ukur utama bagi pembangunan. Namun sesuai dengan perubahan waktu, aspek pembangunan manusia dan pembangunan sumber daya alam semakin ditekankan. Pembangunan sumber daya alam melihat kepada aspek manfaat kepada generasi akan datang melalui kebijakan masa kini. Oleh karena itu konsep pembangunan dan pertumbuhan tidak ditafsirkan dari perspektif ekonomi semata-mata, namun meliputi berbagai disiplin seperti pendidikan, perindustrian dan kebijakan (Idris dan Dan 2004).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, karena penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa didapat lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau produk domestik bruto (PDB) setiap tahun (Tambunan, 2003).

Pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercipta melalui bekerjanya pasar secara efisien. Mekanisme pasar akan bekerja secara efisien apabila tersedia tata aturan dan hukum-hukum pasar yang dilaksanakan dengan baik. Ketersediaan tata aturan dan hukum tersebut mengundang peran para pembuat undang-undang (parlemen) dan pelaksana undang-undang (pemerintah). Selain itu, pemerintah termasuk bank sentral menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan untuk lebih cepat merealisasikan tujuan yang diinginkan dalam koridor undang-undang atau peraturan yang sudah dijalankan. Atas dasar itu, pemerintah melalui kebijakan makro ekonomi, investasi, perdagangan, pelaksanaan hukum serta perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi bekerjanya pasar secara optimal. Demikian pula halnya bank sentral yang menetapkan kebijakan moneter, sebagai salah satu elemen kebijakan makro ekonomi mempunyai peranan penting dalam penciptaan kondisi bagi bekerjanya mekanisme pasar yang efisien (Abdullah, 2003).

Sementara konvergensi didefinisikan sebagai tendensi suatu perekonomian negara yang sedang berkembang (*poor economy*) tumbuh dengan tingkat pendapatan perkapita yang tinggi dibandingkan perekonomian

yang telah maju (*rich economy*) sehingga perekonomian berkembang tersebut mengejar ketertinggalannya untuk mensejajarkan diri dengan perekonomian yang telah maju (Barro dan Sala-i-Martin, 1992). Isu konvergensi ini timbul akibat adanya kesenjangan antara negara berkembang dengan negara yang telah maju serta proses pertumbuhan yang dimilikinya. Bagaimana cara mengukur kecepatan negara berkembang untuk mengejar ketertinggalannya negara maju, dan bagaimana polanya. Isu ini telah diangkat oleh para ahli ekonomi dan dibahas oleh Barro dan Sala-i-Martin yang mengangkat secara khusus mengenai konvergensi *Journal of Political Economy*, 1992, vol 100, No.2. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kecepatan konvergensi negara-negara di seluruh dunia baik Amerika Serikat, Eropa dan negara-negara berkembang sebesar 2% pertahun. Faktor-faktor yang menentukan konvergensi ini disebabkan perkembangan teknologi yang akan mempercepat konvergensi, khusus untuk Amerika Serikat, kecepatan konvergensi output lebih cepat jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita, dan faktor yang terpenting lainnya dalam menentukan kecepatan konvergensi adalah mobilitas tenaga kerja dan teknologi (efisien teknologi).

Barro dan Sala-i-Martin (1995) merekomendasikan penelitian konvergensi lebih lanjut untuk melihat: 1). Pengaruh yang berhubungan dengan diminishing return to capital dan kesenjangan antara jenis capital (physical capital dan human capital) dalam konteks perekonomian tertutup

terhadap konvergensi; 2). Pengaruh mobilitas capital dan tenaga kerja disepanjang perekonomian terhadap konvergensi; dan 3). Pengaruh penyebaran teknologi terhadap konvergensi.

Teori pertumbuhan neo klasik mengasumsikan bahwa dua negara dengan tingkat teknologi yang sama akan memiliki tingkat steady state pertumbuhan pendapatan per kapita yang sama. Hal ini menyebabkan negara yang memiliki rasio modal/tenaga kerja yang lebih rendah akan memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki rasio modal tenaga kerja yang lebih tinggi. Fenomena ini disebut absolute convergence. Sedangkan conditional convergence adalah situasi dimana negara yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi pada negara tertentu yang memiliki level pendapatan perkapita mula yang lebih rendah relatif terhadap jangka panjang atau posisi steady state. Prediksi dari conditional convergence ini telah digunakan secara luas sebagai hipotesis empiris dengan hasil yang beragam. Karena itu, negara berkembang yang memiliki modal sedikit, tetapi memiliki tingkat tabungan dan tingkat teknologi yang sama dengan negara maju, dalam jangka waktu tertentu akan dapat mengejar tingkat pendapatan negara maju tersebut. (Diaz, 1965).

Model neo klasik memprediksi bahwa negara dengan tingkat pendapatan yang tinggi akan cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih

lambat daripada negara dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah karena adanya diminishing return pada modal fisik, dengan asumsi ceteris paribus. (Barro dan Sala-i-Martin, 1998).

2.6. Tinjauan Teoretis dan Konsep Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja berkaitan dengan peluang para angkatan kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Atau dalam definisi lainnya, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan ataupun kebutuhan tenaga kerja. Kesempatan kerja biasanya tercipta sebagai dampak banyaknya kegiatan usaha yang berjalan, baik usaha yang dilakukan oleh pihak swasta, maupun usaha yang dilakukan oleh pemerintah.

Semakin rendah kesempatan kerja di suatu negara, maka semakin besar pula jumlah angkatan kerja yang tidak dapat bekerja. Hal ini menyebabkan pengangguran besar-besaran di sebuah negara. Untuk menghindari hal ini, biasanya pemerintah suatu negara mencoba untuk mendatangkan pengusaha-pengusaha dari pihak asing untuk berinvestasi ataupun menjalankan usahanya di dalam negara tersebut.

Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan, semakin banyak orang yang bekerja semakin luas kesempatan kerja. (Esmara, 1986). Sementara Sagir (1994), memberikan pengertian kesempatan kerja sebagai

lapangan usaha atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dari kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan. Sedangkan Sukirno (2000), memberikan pengertian kesempatan kerja sebagai suatu keadaan dimana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan.

Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi pembentukan pendapatan nasional melalui akumulasi modal yang dapat memperluas kesempatan kerja. Tetapi apabila laju pertumbuhan ekonomi rendah, maka pendapatan nasional rendah, sehingga tabungan menjadi kecildan persediaan modal untuk investasi kecil. Akibatnya kesempatan kerja relatif sempit dan mampu menyerap tenaga kerja yang sedikit, sekalipun terbatas pada tenaga kerja yang mempunyai pendidikan dan keahlian tertentu saja. Dengan keadaan itu melalui proses waktu, taraf hidup bertambah rendah lagi akibat pertambahan penduduk yang berlebihan. Sehingga proses lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal akan berlangsung. Oleh karena itu, maka sasaran utama pembangunan ekonomi adalah pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya.

Dalam suatu perekonomian secara keseluruhan, kesempatan kerja tergantung pada keputusan untuk menentukan berapa banyak pekerja yang

dipekerjakan guna memperoleh keuntungan yang maksimal. Alokasi kesempatan kerja menurut lapangan usaha, seringkali digunakan sebagai indikator tingkat pembangunan suatu negara. Dimana pergeseran struktur kesempatan kerja berlangsung dari kegiatan tradisional ke sektor modern yang ditandai dengan terjadinya proses pembangunan pada suatu negara.

Teori Neo Klasik menganggap bahwa ratio modal dengan produksi dapat dengan mudah mengalami perubahan, dengan kata lain bahwa untuk mencapai sejumlah produksi tertentu dapat dipergunakan berbagai jumlah modal yang berbeda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda pula dengan yang diperlukan. Secara operasional apabila modal yang diperlukan lebih besar (padat modal), maka lebih kecil tenaga kerja yang diperlukan, demikian pula sebaliknya.

Keynes mengatakan bahwa dalam suatu perekonomian secara keseluruhan, maka kesempatan kerja tergantung dari semua pengusaha individual yang disatukan, mengenai berapa banyak pekerja yang dipekerjakan guna memaksimalkan laba perusahaan. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai pemerataan pembagian pendapatan masyarakat akan dapat mempengaruhi kebutuhan pokoknya, menikmati pelayanan kesehatan, ataupun memperoleh kesempatan belajar dan yang lebih utama adalah diperlakukan adil.

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan kesempatan kerja adalah pekerjaan (employment) yang mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja yang ada dari suatu kegiatan perekonomian (produksi), sehingga dengan demikian kesempatan kerja adalah termasuk lapangan kerja yang sudah diduduki dan masih lowong (yang mengandung arti masih ada kesempatan kerja) timbul kemudian kebutuhan tenaga kerja.

Menurut Undang-undang pokok Ketenagakerjaan No.14 tahun 1969 bahwa Tenaga Kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan atau setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Teori Lewis

Menurut teori ini kelebihan pekerja merupakan suatu kesempatan dan bukan suatu masalah. Lewis secara implisit menunjukkan bahwa kelebihan pekerjaan di satu sektor memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor yang lain. Lewis pada dasarnya menganjurkan pembangunan industri di kota-kota dengan menyerap pekerja dari sektor yang lain. Lewis pada dasarnya menganjurkan pembangunan industri di kota-kota dengan menyerap pekerja dari sektor subsisten.

Lewis mengindikasikan perekonomian negara berkembang sebagai perekonomian yang memiliki dua struktur yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Sektor subsisten adalah sektor yang produktifitas marjinal pekerjaanya hampir-hampir nol atau bahkan negatif. Sektor subsisten ini tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga mencakup para pedagang kaki lima, tukang kebun, penyemir sepatu, pengecer koran dan lain sebagainya.

Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerjaan dan tingkat upah relatif lebih murah dibandingkan sektor kapitalis modern. Dengan kondisi negara berkembang seperti itu maka kunci keberhasilan dalam pembangunan industri dengan kelebihan penawaran pekerja adalah pemindahan pekerja dari sektor subsisten terbelakang, yang memiliki produktifitas marjinal mendekati nol, untuk menunjang sektor industri modern.

Selama jumlah pekerja berlimpah di sektor subsisten terbelakang, pemindahan tersebut tidak akan mempengaruhi atau menurunkan produktifitas disektor subsisten terbelakang. Relatif lebih murah nya biaya upah pekerja asal desa akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha dikota untuk memanfaatkan pekerja dalam pengembangan lebih lanjut industri modern dikota. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran bekerja disektor subsisten terbelakang akan terserap dan

bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja tersebut maka pada suatu saat tingkat upah dipedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan/ketimpangan tingkat pendapatan antara desa dan kota.

Dalam model ini, adanya kelebihan pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan. Model ini mengasumsikan bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis terjadi secara lancar. Diasumsikan bahwa perpindahan dari sektor subsisten tak akan pernah menjadi terlalu banyak. Model Lewis ini dibahas dalam suatu artikel berjudul: "Pembangunan Ekonomi dengan Persediaan Tenaga Kerja Terbatas".

Model Ranis-Fei

Ranis-Fei banyak meminjam gagasan dari Lewis, namun mereka berdua telah berhasil dalam menjelaskan sejumlah gagasan dan hubungan penting yang oleh Lewis ditinggalkan dalam bentuk yang belum selesai. Ranis-Fei membuat secara sangat implisit bahwa upah nyata disektor modern atau yang disebut sektor industri sangat erat hubungannya dengan besarnya kelebihan sektor pertanian. Penarikan tenaga kerja dari sektor tradisional akan jumlah konsumen disektor tersebut dan akibatnya

menciptakan surplus dari produk sektor pertanian yang dapat dijual melalui pasar-pasar di daerah industri. Apabila karena sesuatu hal, jumlah surplus per pekerja disektor industri menurun, maka hal itu cenderung menyebabkan upah disektor industri cenderung akan turun.

Seperti halnya dalam model Lewis, penarikan pekerja dari sektor pertanian dengan cara menurunkan output cenderung akan menurunkan jumlah surplus pertanian per pekerja dan menaikkan upah disektor industri. Apabila kecenderungan alamiah dan otomatis dari produktivitas pertanian ini meningkat cukup kuat dan cepat, maka mungkin sekali masalah yang digambarkan dalam titik balik Lewis (Lewis Turn Point) tidak akan pernah tercapai.

Oleh karena itu Ranis-Fei dapat menganjurkan kemungkinan balance growth, dimana kenaikan produktivitas disektor pertanian adalah cukup cepat untuk menyeimbangkan kembali kenaikan permintaan bahan pokok yang timbul karena bertambahnya penduduk diseluruh negara pada umumnya. Usaha mempertahankan setiap penurunan dalam surplus pertanian per pekerja industri lebih baik dilakukan dengan cara merangsang investasi disektor industri.

Seringkali pembuatan kebijaksanaan (policy markers) sengaja mempengaruhi intersectoral terms of trade, dalam usaha untuk mendorong pertumbuhan industri, mereka dapat menentukan harga tertinggi ceiling price

dari hasil-hasil pertanian atau mungkin dengan meningkatkan harga-harga industri yang selanjutnya cenderung melemahkan pembangunan pertanian, melainkan hal tersebut sering merupakan hasil dari suatu kebijaksanaan yang dirancang untuk mengembangkan pertumbuhan industri.

Model Ranis-Fei adalah konsep mereka mengenai komersialisasi dari tenaga kerja di seluruh sistem ekonomi, yang diartikan dengan komersialisasi adalah kenaikan produktivitas kenaikan marjinal disektor pertanian menuju tingkat upah yang dibayarkan. Sampai saat tercapainya titik tersebut yaitu melalui perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, kelebihan tenaga kerja tetap ada disektor pertanian dan output total dalam keseluruhan sistem ekonomi adalah hutang dari produksi maksimum yang dapat dicapai.

2.7. Tinjauan Teoretis dan Konsep Kemiskinan

Kemiskinan bukanlah fenomena baru di dalam kehidupan sosial, tapi tetap selalu menarik untuk dikaji karena merupakan masalah yang cukup serius untuk mendapatkan penanganan dari para penyelenggara negara. Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum. Hal tersebut berhubungan erat dengan kualitas kualitas hidup. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber

daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, (Chambers, 1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1). Kemiskinan (*poverty*); 2). Kelemahan fisik (*physical weaknesses*); 3). Kerentanan menghadapi situasi darurat (*vulnerability to emergency situations*); 4). Ketidakberdayaan (*powerlessness*); 5). Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologi. Keterkaitan kelima kelompok ini akan memberikan 25 hubungan sebab akibat berbentuk negatif seperti sebuah jaring laba-laba untuk menjaring orang dalam kemiskinan. Kemiskinan sebagai penyebab utama kelemahan fisik melalui kekurangan pangan dan gizi, tubuh kecil dan malnutrisi menyebabkan respon kekebalan rendah terhadap infeksi, ketidakmampuan untuk menjangkau atau membayar terhadap jasa-jasa kesehatan yang disediakan pemerintah. Kemiskinan juga merupakan penyebab utama terhadap isolasi karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan atau sekolah dan tinggal di kawasan kumuh serta liar.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup: (a). Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan.

Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. (b). Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. (c). Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi menurut UNDP, kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: 1). Kemiskinan Absolute, kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk

memperoleh kebutuhannya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari; 2). Kemiskinan Relatif, kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Todaro (1995), menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1). luasnya negara, (2). perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3). perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4). relatif pentingnya sektor publik dan swasta, (5). perbedaan struktur industri.

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal

menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dst. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama di tahun 1953, yang mengatakan : “*A poor country is poor because it is poor*” (Negara miskin itu karena dia miskin). Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini. (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Menurut Nurkse, inti dari lingkaran kemiskinan adalah keadaan keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak, pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan di lain pihak merupakan perangsang untuk menanamkan modal. Di negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi, menurut pandangan Nurkse terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu dari segi penawaran modal dan permintaan modal.

Dari segi penawaran modal, lingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut: tingkat pendapatan masyarakat rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan

masyarakat untuk menabung juga rendah. Hal ini menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang akan mempengaruhi kemiskinan.

Sementara dari segi permintaan modal, lingkaran setan kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda di setiap negara. Di negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh produktivitasnya rendah ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.

Faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan menurut (Mudrajad Kuncoro, 2011) sebagai berikut: 1). Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. 2). Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah. 3). Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

Teori Keadilan Distributif

Berbicara mengenai konsep keadilan dalam bidang ekonomi maupun lainnya tidak terlepas dari pemikiran John Rawls, filsuf berkebangsaan Amerika di akhir abad ke-20. Ia penulis salah satu karya monumental berjudul *A Theory of Justice*, buku yang menganalisis kembali permasalahan mendasar dari kajian filsafat politik dengan merekonsiliasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan. Keadilan dipandang sebagai suatu keadaan di mana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara bersama-sama. Keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan khususnya masyarakat lemah.

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan keadilan menggunakan posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Rawls berpendapat bahwa prinsip asali berusaha memposisikan adanya situasi yang sama dan setara bagi setiap orang dalam masyarakat. Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan lainnya sehingga semua orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lain secara seimbang. Posisi asali bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari ciri rasionalitas, kebebasan, dan persamaan guna mengatur struktur dasar masyarakat.

Sementara itu, maksud dari selubung ketidaktahuan adalah bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu sehingga membutuhkan adanya konsep tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua konsep ini, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil.

Lebih lanjut, Rawls menjelaskan bahwa para pihak dalam posisi asli akan mengadopsi dua prinsip keadilan. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat bagi yang paling tidak diuntungkan, jabatan dan posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil. Prinsip pertama disebut prinsip kebebasan yang sama. Sedangkan prinsip kedua mengandung prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan.

Prinsip perbedaan pada bagian kedua berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijakan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara prinsip persamaan kesempatan tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, tetapi juga adanya kemauan dan kebutuhan dari

kualitas tersebut. Dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan dan kebutuhan dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan perspektif Rawls.

Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberi manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan prinsip lainnya saling berhadapan. Jika terjadi konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua. Sementara dalam prinsip kedua, persamaan kesempatan harus didahulukan dari pada prinsip perbedaan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, Rawls berusaha untuk memposisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.

2.8. Tinjauan Empiris

a. Hubungan Utang Luar Negeri terhadap Kemiskinan

Jumlah utang luar negeri Indonesia saat ini masih tetap besar dan setiap tahunnya terus bertambah. Sementara adanya penurunan nilai tukar rupiah secara otomatis kurs utang luar negeri Indonesia juga ikut melambung (khususnya utang luar negeri). Tidak mudah bagi pemerintah untuk menyikapi bagaimana sebaiknya memperlakukan kebijakan utang, khususnya yang berasal dari pemodal luar negeri.

Pengelolaan keuangan negara tidak hanya berhenti pada perspektif bagaimana caranya untuk sekadar mendapatkan dan/atau menghabiskan anggaran belanja. Persoalan tersebut lebih tepatnya diposisikan sebagai *outcome* karena masih ada dimensi lanjutan sebagai hasil (*output*) atas kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah. Di Indonesia, target dari APBN biasanya dikaitkan dengan asumsi makro ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, nilai tukar, suku bunga, harga minyak, serta penanganan ketimpangan dan kemiskinan.

Diantara berbagai asumsi tersebut, persoalan kemiskinan bisa dikatakan sebagai target yang dapat dianggap sebagai produk paling akhir dari rentetan *output*. Logika sederhananya bisa dibayangkan apa pun kebijakan yang ditempuh pemerintah muaranya adalah mengentaskan jumlah penduduk miskin di wilayah kekuasaannya. Kemiskinan merupakan satu contoh

problematika yang harus ditanggung pemerintah. Hal tersebut disebabkan pasar tidak akan care terhadap kemiskinan. Joko Waluyo (2006), hasil penelitiannya menunjukkan pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan utang luar negeri, melalui bank sentral, dan melalui bank umum akan berdampak positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini pemerintah bisa dianggap sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab untuk segera menyelesaikannya. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan kebijakan utang yang akhir-akhir ini jumlahnya kian menggelembung. Jumlah utang yang besar ini seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Kebijakan utang (dengan segala risikonya) memang sebaiknya dikelola untuk mendorong produktivitas dalam negeri. Para penduduk miskin juga akan lebih baik lagi jika ikut menikmati hasil utang dengan fasilitas program-program pemerintah yang menunjang perbaikan taraf hidupnya. Jadi secara umum utang yang lebih tinggi memang sudah sepantasnya berpengaruh lebih positif lagi pada program penanganan kemiskinan.

Yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah dana pinjaman tersebut harus diarahkan pada sektor-sektor produktif, tidak sekadar “memanjakan” penduduk miskin sehingga tidak menyelesaikan inti persoalan. Kunci utama mengatasi persoalan kemiskinan adalah dengan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak melalui program-program

yang mendorong produktivitas. Misalnya program kredit modal, subsidi energi untuk produksi, pengembangan keterampilan dan vokasi, serta fasilitas peningkatan daya saing. Seandainya penduduk miskin serta masyarakat yang tingkat perekonomiannya sedikit di atas garis kemiskinan mampu diangkat harkat martabatnya, mungkin gejolak mengenai utang luar negeri akan lambat laun mampu segera diredam.

Masyarakat menyaksikan sendiri bagaimana kredibilitas pemerintah di dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu dengan bertambahnya jumlah penduduk yang sejahtera, pemerintah juga akan diuntungkan dengan adanya peluang untuk mengefektifkan pajak sehingga semakin banyak pemasukan bagi negara untuk mengakselerasi pembangunan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Dari pernyataan Syaparuddin dan Dahmiri (2010), diketahui peningkatan utang luar negeri pemerintah sebesar 1% akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,417%. Pengaruh utang luar negeri pemerintah terhadap tingkat kemiskinan tidak signifikan. Berdasarkan gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa diperlukan waktu (tidak dalam jangka pendek) dari utang luar negeri pemerintah untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pengaruh utang luar negeri pemerintah terhadap pengurangan tingkat kemiskinan tidaklah bersifat langsung tetapi melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Desyana Eka Pramasty dan Lidya Rosintan (2014), hasil penelitiannya menunjukkan utang luar negeri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Tujuh Negara ASEAN. Investasi asing langsung berpengaruh positif terhadap signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Tujuh Negara ASEAN. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Tujuh Negara ASEAN.

Sementara Gita Estu Wulandari (2013), hasil penelitiannya menunjukkan hasil jangka pendek, beban utang, investasi, dan pertumbuhan populasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam jangka panjang beban utang dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pertumbuhan populasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karenanya dibutuhkan kajian yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Faktor lain yang menyebabkan utang luar negeri pemerintah terutama dalam jangka pendek tidak dapat mengurangi kemiskinan dan bahkan menyebabkan terjadinya peningkatan kemiskinan karena utang luar negeri pemerintah tersebut umumnya digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan

masyarakat atau sektor produksi. Besarnya beban cicilan pokok dan bunga utang luar negeri pemerintah yang dibayarkan setiap tahunnya menyebabkan terbatasnya anggaran dana pemerintah yang didistribusikan untuk program peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan, apalagi sejak tahun 1985 utang baru yang masuk di sektor pemerintah sudah lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri pemerintah. Oleh karena itu tidak mungkin dampak utang luar negeri pemerintah akan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini tidak sejalan dengan pandangan berbagai kalangan yang mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan haruslah menjadi sasaran pokok pembangunan (Todaro, 2000).

Kurangnya dampak utang luar negeri pemerintah terutama utang luar negeri pemerintah terhadap pengurangan tingkat kemiskinan disebabkan antara lain pemerintahan negara-negara penerima bantuan luar negeri tidak memiliki kemauan yang kuat dalam mengurangi kemiskinan tersebut termasuk adanya moral hazard problem. (Syaparuddin dan Dahmiri, 2010)

Selanjutnya laju inflasi yang semakin meningkat juga dapat berdampak terhadap bertambahnya penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang tinggi dapat memperburuk tingkat kemiskinan sekaligus tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi membuat harga-harga menjadi lebih tinggi, jika percepatan laju inflasi tidak diimbangi oleh peningkatan laju pendapatan maka ia akan berdampak

pada penurunan pendapatan secara riil dan selanjutnya akan berdampak pada kemiskinan. Indikasi lain dari kecilnya dampak produk domestik bruto tahun sebelumnya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan adalah bahwa produk domestik bruto tahun sebelumnya yang besar hanyalah dinikmati sebagian kecil masyarakat terutama yang bergerak di sektor industri dan jasa. (Syaparuddin dan Dahmiri, 2010)

Syaparuddin (2002), menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan angka kemiskinan. Mempercepat pembayaran hutang-hutangnya terutama hutang-hutang yang bersifat komersil dan jangka pendek sehingga beban hutang dapat dikurangi. Memang ini tidak mudah mengingat di sektor pemerintah telah terjadi negative in flow kemudian meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Mengingat defisit transaksi berjalan juga berdampak positif terhadap utang luar negeri pemerintah, peningkatan nilai ekspor sangat diperlukan. Pemerintah harus memainkan peran penting dalam hal ini melalui kebijakan-kebijakannya terutama kebijakan investasi baik yang berhubungan dengan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, misalnya mempermudah atau mempercepat proses perizinan termasuk menghindari political cost dan process/procedure cost yang selama ini dirasakan oleh investor memberatkan dan membuat mereka kurang tertarik berinvestasi di Indonesia karena dapat merugikan. Kita tentu tidak ingin lagi terjadi pelarian

investasi besar-besaran (negative in flow) termasuk investasi asing langsung ke negara lain sebagaimana yang terjadi sejak tahun 1997 hingga 2001 hanya karena pemerintah tidak dapat menjamin kepastian usaha di Indonesia, padahal perannya dalam perekonomian cukup penting seperti dalam meningkatkan produk domestik bruto tahun sebelumnya dan mengurangi kemiskinan yang dibuktikan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya termasuk dari penelitian ini.

Pemerintah harus dapat menciptakan dan menjaga situasi dan kondisi agar selalu kondusif bagi kegiatan investasi, mengingat investasi adalah kata kunci peningkatan ekspor melalui peningkatan produksi sebagaimana yang terjadi di negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan RRC, dimana perekonomian mereka sangat didorong oleh ekspor. Pola ini pula yang ditunjukkan oleh beberapa negara Asia lainnya dalam perekonomiannya. Pertumbuhan ekspor yang tinggi akan dapat mendorong faktor input dan akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Chow, 2007).

Syaparuddin dan Dahmiri (2010) menjelaskan bahwa dari permintaan utang luar negeri pemerintah secara simultan dipengaruhi oleh defisit anggaran pemerintah, defisit tabungan-investasi, defisit transaksi berjalan dan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dan tingkat kemiskinan. Semakin besar defisit anggaran pemerintah, defisit tabungan investasi, defisit transaksi berjalan, pembayaran pokok dan utang bunga luar negeri dan tingkat

kemiskinan semakin besar pula utang luar negeri pemerintah. Peningkatan permintaan utang baru pemerintah tidak banyak berdampak terhadap penurunan prosentase penduduk miskin di Indonesia, bahkan yang terjadi sebaliknya meskipun tidak signifikan. Pengaruh variabel utang luar negeri pemerintah terhadap pengurangan tingkat kemiskinan tidaklah bersifat langsung tetapi melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dimasa-masa krisis ekonomi melanda Indonesia, secara statistik tidak terjadi lonjakan jumlah utang luar negeri setiap tahunnya. Lonjakan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 1998 yang mencapai lebih dari empat kali lipat dibandingkan dengan tahun 1996.

b. Hubungan Investasi terhadap Kemiskinan

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat dapat secara terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, pendapatan nasional, dan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu: 1). Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; 2). Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; 3). Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Agung (2018), hasil penelitiannya menunjukkan secara langsung variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara langsung variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya pengaruh investasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan. Untuk pengangguran terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.

Beberapa indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan selain dari tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan telah dikaji oleh Arshanti dan Wirathi (2015), temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Fan, Hazel dan Thorat (1999), menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan di daerah pedesaan India dengan mempertimbangkan banyak variabel endogen. Hasil studinya menunjukkan

bahwa, peningkatan investasi pemerintah di sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan serta pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan mempunyai dampak nyata terhadap kemiskinan. Sementara untuk pengeluaran pembangunan jalan mempunyai dampak paling besar terhadap penurunan angka kemiskinan.

Fan, Zhang dan Zhang (2002), menganalisis peran pengeluaran pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan China. Hasil penelitian studinya menunjukkan bahwa peningkatan investasi pemerintah di sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan, serta pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan mempunyai dampak nyata terhadap kemiskinan. Sementara pengeluaran untuk pendidikan mempunyai dampak yang paling besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Phany Inneke Putri (2014), hasil penelitiannya menunjukkan variabel PMDN, PMA, pengeluaran modal, tenaga kerja, dan infrastruktur berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian Sayekti Suindyah (2009), menunjukkan variabel investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Investasi memungkinkan masyarakat dapat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Peranan ini

bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi yaitu: investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.

Badawi (2003) melakukan penelitian dengan menggunakan sebuah model koreksi tingkat kesalahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, investasi swasta memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara investasi publik memberikan efek negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan. Dari kebijakan utama mencapai investasi dapat memfasilitasi terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Krisis global menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami penurunan dikarenakan terjadinya kinerja neraca pembayaran yang menurun, tekanan kepada nilai tukar rupiah, dan dorongan pada laju inflasi. (Adhisasmita, 2005). Dampak dari krisis global selama ini hanya membawa angka kemiskinan di Indonesia kembali meningkat. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang mendasar dan pusat perhatian di negara manapun. Bangsa Indonesia sejak merdeka sudah berupaya untuk mengurangi kemiskinan namun hasilnya jauh dari memuaskan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat investasi yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran

yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. (Ernawati, 2012)

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar (Sianturi, 2007). Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung telah dilaksanakan baik dalam skala nasional maupun lokal. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin dan mengurangi beban biaya bagi rumah tangga yang sangat miskin (Mahsunah, 2013).

Peranan para pelaku ekonomi tidak akan pernah lepas dalam mensejahterakan masyarakat dari jerat kemiskinan dan kemajuan ekonomi yakni pemerintah yang berperan sebagai instrumen kebijakan publik dan fiskal, swasta yang berperan dalam pengembangan investasi dan masyarakat yang berperan sebagai input dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengeluaran pemerintah merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa

besar pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang dicapai Lewis, 1954). Dalam perkembangannya, alat indikator ini tidak saja berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB tetapi juga melibatkan seberapa tinggi tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan (Nizar, 2013).

Disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah proses pembangunan nasional juga ditentukan oleh investasi. Pembangunan nasional merupakan salah satu cara membuka pintu investasi bagi investor. Pengaruh investasi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja masih akan berpengaruh terhadap hal lain. Setelah meningkatnya penyerapan tenaga kerja maka diharapkan terjadi peningkatan produksi yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Peningkatan investasi dapat dipastikan akan memperbesar jumlah lapangan pekerjaan sehingga peningkatan investasi diharapkan dapat diikuti dengan meningkatnya penyerapan jumlah tenaga kerja (Herman, 2011).

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Berbagai strategi dilakukan pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan dengan pelaksanaan pelaksanaan program pro-rakyat serta memberikan sarana yang memadai untuk mampu mengakses dan memenuhi berbagai pelayanan kebutuhan masyarakat yang berpotensi sebagai penggerak roda ekonomi. Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dipengaruhi oleh potensi yang ada pada setiap kabupaten/kota, potensi yang paling berkembang pesat di Provinsi Bali adalah pariwisata dan pertanian. Kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang bersifat multidimensional dan merupakan bagian yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat pada umumnya (Suryawati,2005).

Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sejumlah 35,1 juta (15,9 persen). Tahun 2006 keadaan semakin memburuk, terjadi guncangan ekonomi cukup dahsyat di Indonesia yang menyebabkan meningkatnya jumlah kemiskinan sekitar 39,3 juta (17,75 persen), hal itu terjadi karena pemerintah menaikkan harga BBM . Tetapi keadaan semakin lama semakin membaik, terbukti di tahun 2007 ditandai dengan jumlah penduduk miskin menurun cukup signifikan hingga 2014. (Gusti Ayu Putu Ambara Ratih dkk, 2017)

Daerah perkotaan yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi. Perkembangan investasi di Indonesia dapat dilihat

melalui investasi fisik pembentukan modal tetap domestik bruto. Investasi fisik sangat dominan di beberapa daerah maju seperti di beberapa wilayah daerah di Indonesia. Besarnya investasi fisik di daerah ini tidak lepas dari pengaruh sektor pariwisata yang memang menjadi tulang punggung perekonomian di daerah tersebut. Keengganan investor berinvestasi di sektor lain seperti pertanian, membuat kabupaten lain sulit menyaingi daerah dalam menarik investasi. Ketersediaan infrastruktur yang lebih baik di daerah ini juga menjadi pendorong investasi yang cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah baik itu pemerintah provinsi maupun pusat untuk mengarahkan investasi secara lebih merata nampaknya menunjukkan hasil. (Omoniyi, 2011).

c. Hubungan Jumlah Uang Beredar terhadap Kemiskinan

Jumlah uang beredar adalah uang yang berada di tangan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa jika ada penambahan volume jumlah uang beredar dalam masyarakat (uang kartal dan uang giral) maka akan terjadi inflasi. Penambahan jumlah uang beredar ini merupakan sumber utama penyebab inflasi karena volume jumlah uang beredar lebih besar dari kesanggupan output untuk menyerapnya (volume yang besar dari pendapatan nasional).

Ketika inflasi terjadi akibat bertambahnya jumlah uang beredar maka daya beli masyarakat miskin akan berkurang atau tetap, sehingga masyarakat miskin tidak dapat keluar dari kemiskinannya. Menurut Hudaya (2011), uang yang beredar adalah jumlah mata uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral yang terdiri dari uang logam dan uang kertas termasuk uang kuasi yang meliputi deposito berjangka, tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik. Hal ini dikarenakan uang kuasi dapat diubah menjadi uang tunai yang fungsinya sama seperti uang kartal.

Hubungan antara jumlah uang beredar dan kurs yaitu apabila rupiah terapresiasi maka akan meningkatkan konsumsi khususnya barang-barang impor yang berpengaruh terhadap jumlah uang beredar. Hubungan antara jumlah uang beredar dengan suku bunga SBI yaitu jika suku bunga mengalami kenaikan maka akan meningkatkan suku bunga kredit dan suku bunga deposito. Suku bunga yang tinggi dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Suku bunga merupakan harga yang harus dibayar jika terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah nanti. Kenaikan suku bunga yang tidak wajar dapat menyebabkan sulitnya dunia usaha untuk membayar beban bunga dan kewajiban karena suku bunga yang tinggi akan menambah beban perusahaan (Mahendra, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) diperoleh hasil bahwa secara simultan, jumlah uang beredar, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia

dan suku bunga kredit investasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Secara parsial, jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia dan suku bunga kredit investasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Komariyah, (2016) juga meneliti tentang Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), Kurs Dan Suku Bunga Terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1999-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga selama periode 1999 sampai dengan 2014 tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi kurs berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Langi, Masinambow, dan Siwu, (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar Dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat kemiskinan Di Indonesia menunjukkan bahwa secara simultan, perubahan suku bunga BI, jumlah uang beredar dan tingkat kurs berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Secara parsial, suku bunga BI berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Jumlah uang beredar dan kurs tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh A. Mahendra, (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI Dan Nilai Tukar Terhadap kemiskinan Di

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar, suku bunga SBI dan nilai tukar selama periode 2005 sampai dengan 2014 tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia dikarenakan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar ditentukan oleh Bank Sentral dan jumlah uang yang diminta ditentukan oleh faktor seperti tingkat harga rata-rata dalam perekonomian. Jumlah uang yang diminta masyarakat untuk melakukan transaksi bergantung pada tingkat harga barang dan jasa yang tersedia. Peningkatan harga kemudian akan mendorong naiknya jumlah uang yang diminta masyarakat (Perlambang, 2010).

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Venny Kurnia Putri, (2017) dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Dan Suku Bunga Kredit Investasi terhadap Inflasi Di Indonesia menunjukkan bahwa secara parsial, jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif terhadap inflasi di Indonesia dan suku bunga kredit investasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heru Perlambang, (2010) dalam penelitian yang berjudul

Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Terhadap Tingkat Inflasi menunjukkan bahwa secara parsial jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

d. Hubungan Inflasi terhadap Kemiskinan

Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus, dan bisa juga disebut gejala ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang dapat disediakan masyarakat. Hal ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia.

Apabila harga-harga naik secara drastis, maka tingkat kemiskinan akan naik bila tingkat upah masyarakat tetap. Jika tingkat upah tetap sementara harga barang-barang naik maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan karena inflasi mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya.

Iman Sugema, dkk (2010), dalam jurnal *The Impact of Inflation on Rural Poverty in Indonesia an Econometrics Approach*. Pada jurnal ini rumah tangga miskin di pedesaan akan mengalami dampak lebih parah karena karena

fluktuasi harga pada makanan. Selanjutnya, besarnya PIP (price interest point) atau poin bunga harga yang dikenal sebagai pergerakan harga numerik terkecil di dalam bursa menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir inflasi memiliki dampak besar pada rumah tangga miskin di daerah pedesaan dan perkotaan relatif terhadap rumah tangga non-miskin. Jurnal ini menunjukkan inflasi di Indonesia memiliki dampak yang tinggi terhadap kemiskinan. Selain itu, studi ini menemukan menyebabkan dampak yang relatif lebih tinggi pada masyarakat miskin di tingkat nasional.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Secara lokal maupun nasional, kemiskinan mempunyai empat dimensi pokok, yaitu: 1). kurangnya kesempatan (lack of opportunity); 2). rendahnya kemampuan, 3). kurangnya jaminan, dan 4).

ketidakberdayaan. Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek (Simatupang dan Saktyanu, 2003).

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus sepanjang waktu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan meluas (atau mengakibatkan kenaikan) pada barang lainnya. Sehingga, apabila harga-harga naik secara drastis dalam periode tertentu maka tingkat kemiskinan juga akan naik. Tingkat kemiskinan naik bila tingkat upah tetap, jika tingkat upah tetap sedangkan harga barang-barang naik, masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan, karena terjadi inflasi yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya (Nurfitri Yanti, 2009)

Begitu juga dengan penelitian Prastyo (2010) yang meneliti variasi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Oleh karenanya perkembangan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran dan inflasi patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Untuk mengatasi inflasi perlu koordinasi kebijakan yang tepat antara pemerintah sebagai otoritas kebijakan fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter contoh: kebijakan diskonto, pasar terbuka, cash ratio dan pembatasan kredit. Kebijakan fiskal, adalah kebijakan mengatur pengeluaran pemerintah dan mengatur perpajakan. Untuk mengatasi inflasi pemerintah mengambil langkah: menekan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Kebijakan non moneter yang dilakukan pemerintah antara lain: mengendalikan harga, menaikkan hasil produksi, dan kebijakan upah.

e. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk golongan penduduk miskin. Penelitian yang dilakukan Prasetyo (2009) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Menurut Kuznets, menyatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif. Sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan pemerataan pendapatan tidak akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, untuk itu perlu ada

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya menurut Kuznets, mengatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Studi ekonomi umumnya menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan bertalian erat dengan pertumbuhan ekonomi. Secara prinsip, pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan pertama dari pengentasan kemiskinan, sedangkan yang kedua adalah menjamin bahwa pertumbuhan tersebut adalah pro-poor (Kraay, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Datrini dalam Nizar dkk (2013), menjelaskan bahwa elastisnya secara absolut adalah kurang dari satu atau bersifat inelastis artinya pertumbuhan ekonomi tidak dengan serta merta akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Nizar dkk meneliti pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, diperoleh hasil menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negatif dan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan "output per kapita). Disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya

(GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Jadi, proses kenaikan output per kapita tidak bisa tidak, harus dianalisa dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Aspek ketiga dari definisi “pertumbuhan ekonomi” adalah perspektif waktu jangka panjang. Sedangkan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi seringkali di artikan sama, padahal kedua istilah tersebut sangat berbeda artinya.

Sumitro Djojohadikusumo, (1994) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, berdimensi tunggal dan di ukur dengan meningkatnya hasil produksi. Selanjutnya, menurut Sumitro Djojohadikusumo, pembangunan ekonomi memiliki arti jauh yang lebih luas dan lebih dalam, dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Ravallion (1997), Kakwani (2003) dan Bourguignon (2004) yang membahas hubungan antara pertumbuhan, ketimpangan dengan kemiskinan, bahwa dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan hanya dapat terjadi bilamana ketimpangan itu relative tinggi (high inequality). Artinya bahwa, untuk

pertumbuhan berapapun ketimpangan akan turun dan semakin besar terjadinya penurunan kemiskinan. Namun, ketika ketimpangan pendapatan cenderung stabil maka pertumbuhan tetap diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Fan, Zhang dan Rao (2004) menganalisis hubungan antara peranan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di daerah pedesaan di Uganda. Hasil studinya menyatakan bahwa, investasi pemerintah seperti infrastruktur pedesaan, pelayanan pertanian, pendidikan dan kesehatan mempunyai kontribusi terhadap penurunan kemiskinan di pedesaan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh suatu bangsa. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi menimbulkan dua efek samping yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru karena semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Adam Smith (1776) dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry In to the Naturel and Causes of the Wealth of Nations*, menganalisis sebab berubahnya pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Inti dari ajaran Adam Smith adalah agar masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnyadidalam menentukan kegiatan ekonomi.

Bigsten dan Levin (2000) menyatakan bahwa negara yang berhasil

dalam pertumbuhan kemungkinan besar juga akan berhasil dalam menurunkan kemiskinan. Apalagi jika terdapat dukungan kebijakan dan lingkungan kelembagaan, intinya pertumbuhan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan bahwa, teori pertumbuhan ekonomi adalah teori yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara ditinjau dari dua sudut. Pertama, membahas pertumbuhan ekonomi berdasarkan tahap-tahap tertentu (secara historis). Kedua, membahas pertumbuhan ekonomi berdasarkan penyebabnya (secara abalitis), dan teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang relevan dengan teori pertumbuhan ekonomi, yaitu Robert Solow, Harrod Domar serta Joseph Schumpeter.

Para ekonom percaya bahwa pertumbuhan ekonomi menguntungkan hampir semua warga negara karena dapat mengurangi kemiskinan. Jika pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan setiap orang dalam suatu masyarakat dalam proporsi yang sama, maka pendistribusian pendapatan tidak akan berubah. Namun, jika pertumbuhan terjadi tanpa pengurangan kemiskinan, distribusi pendapatan bisa menjadi tidak setara. Ada kemungkinan pertumbuhan yang cepat bisa terjadi tanpa pengurangan kemiskinan, tapi ini tidak mungkin seperti yang ditunjukkan banyak penelitian. Memang distribusi pendapatan memperburuk keadaan, sementara pendapatan orang miskin juga meningkat (Dullah Mulok, et.al. 2012).

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada teori pertumbuhan ekonomi klasik yang baru diterangkan, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. (Kuncoro, 2006)

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada

program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Dimensi kemiskinan dapat berbentuk dari aspek ekonomi, aspek SDM, fisik/infrastruktur, masalah sosial dan keluarga/rumahtangga. Perlu diperhatikan bahwa yang dibutuhkan masyarakat miskin tidak hanya bantuan modal/materi, tetapi juga suatu kondisi yang kondusif yang memungkinkan mereka untuk membentuk jaringan sosial dan ekonomi di antara mereka sendiri. Pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seringkali merupakan lembaga yang terbaik untuk menyediakan lingkungan seperti tersebut. (Kuncoro, 2006)

Berdasarkan penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2006). Menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupan (sufficient condition) adalah bahwa pertumbuhan tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya penuntasan masalah kemiskinan harus dilakukan melalui kebijakan yang sistematis dan terprogram dari pembangunan ekonomi tersebut.

Studi yang dilakukan oleh Sudarno (2002) dari SMERU Research Institut berdasarkan survei yang dilakukan atas 100 desa selama periode Agustus 1998 hingga Oktober 1999. Hasil studi menemukan bahwa (1) terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan dan kemiskinan. Artinya ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang. Namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat lagi, (2) pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan secara permanen, walaupun terjadi pertumbuhan dalam jangka panjang namun masyarakat tetap rentan terhadap kemiskinan, (3) pengurangan ketimpangan mengurangi kemiskinan secara signifikan sehingga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan. Dari penelitian Sumarto tersebut jelas bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, tetapi lebih lanjut ada hasil yang cukup mengejutkan bahwa pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan secara permanen dan pertumbuhan ekonomi harus diciptakan dengan mencegah terjadinya pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan. Ternyata syarat pertumbuhan ekonomi yang meningkat saja tidak cukup, diperlukan tambahan lagi syarat yaitu pertumbuhan yang mencegah ketimpangan di berbagai daerah.

Dalam kaitannya dengan ketimpangan yang terjadi, Avialiani menyatakan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Masyarakat miskin tersebut terdiri

dari 30 juta penduduk miskin dan 70 juta penduduk hampir miskin. Relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi dan makroekonomi Indonesia sepanjang tahun 2012 terasa rapuh karena tidak ditransmisikan pada perbaikan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro belum cukup untuk menjawab permasalahan fundamental ekonomi khususnya pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan tindakan riil dari pemerintah dan keberpihakan terhadap masyarakat yang termarginalkan. (Ari Muliarta Ginting dan Galuh Prila Dewi, 2013)

Kondisi pertumbuhan sektor keuangan yang memiliki pengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sin-Yu-Ho dan Nicholas M. Odhiambo (2011) terhadap pertumbuhan sektor keuangan di negara Cina. Mereka menyimpulkan bahwa ternyata pertumbuhan sektor keuangan di Cina gagal atau tidak memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Dalam Working Paper Series yang ditulis oleh Juzhong Zhuang et al (2009) dan dikeluarkan oleh Asian Development Bank mengatakan bahwa pada negara-negara berkembang pertumbuhan sektor keuangan memegang peranan penting dalam proses pengurangan kemiskinan. Sektor keuangan memegang peranan penting dalam melakukan mobilisasi tabungan, memfasilitasi pembayaran, dan perdagangan barang dan jasa, serta melakukan alokasi yang efisien terhadap sumber keuangan. Sektor keuangan dipandang

memegang peraturan yang penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan secara langsung memberikan perluasan bagi masyarakat terhadap keuangan dan secara tidak langsung pertumbuhan di sektor keuangan ini mampu memberikan kontribusi dalam pengurangan kemiskinan.

f. Hubungan Kesempatan Kerja terhadap Kemiskinan

Menurut Harrod Domar, setiap kenaikan tingkat output maka kesempatan kerja dapat dilakukan. Investasi dapat meningkatkan output perekonomian dan menghasilkan (membutuhkan) input. Dengan investasi baru akan tercipta barang modal baru dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dengan demikian maka akan mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baru dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Untuk menjalankan kegiatan perekonomian pasti membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja disebut sebagai kesempatan kerja. Definisi dari kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja juga meningkat, namun tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang sama. Oleh karena itu, dari sekian banyak angkatan kerja ada penduduk yang tidak bekerja atau disebut sebagai pengangguran.

Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah

masyarakat miskin, setiap negara berupaya melakukan pembangunan. Salah satu sasaran dari pembangunan adalah memperbaiki kondisi ekonomi suatu masyarakat menjadi lebih baik agar jumlah masyarakat miskin dapat berkurang. Kemampuan pemerintah dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin dalam suatu negara dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. Sebaliknya angka kemiskinan yang tinggi dapat mengurangi prestasi pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang tidak mengubah kondisi kemiskinan akan menyisakan masalah yang memicu permasalahan sosial dan politik. Stabilitas negara akan terganggu dan biasanya secara simultan akan berbalik mengganggu kinerja perekonomian yang sedang dibangun. Karena itu, masalah kemiskinan telah menjadi agenda bersama setiap negara yang tergabung dalam membangun komitmen tujuan pembangunan millenium (Suindyah, 2009).

Secara teoritis, kemiskinan yang dialami oleh masyarakat suatu daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai suatu lapangan kerja atau semua jenis pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin banyak orang yang bekerja semakin luas kesempatan kerja. Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan usaha atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian

kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah terisi dan kesempatan kerja dapat juga diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan (Siregar, 2003).

Kesempatan kerja merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang telah lama menjadi fokus kajian para peneliti ekonomi. Hal ini disebabkan kesempatan kerja menjadi salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan kinerja perekonomian suatu wilayah. Peningkatan kesempatan kerja dapat meningkatkan output perekonomian dan pada gilirannya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Peran penting kesempatan kerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan berimplikasi bahwa kebijakan pembangunan ekonomi berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Secara konseptual, hubungan antara kesempatan kerja dan kemiskinan dapat dianalisis dalam tingkatan makro dan mikro. Dalam tingkatan makro, hubungan antara kemiskinan dalam dimensi pendapatan dan kesempatan kerja dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk kurangnya ketersediaan lapangan kerja sehingga sebagian angkatan kerja tidak mampu memperoleh pekerjaan. Mereka tidak hanya berpendapatan rendah, bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Dalam tingkatan mikro, kesempatan kerja dikaitkan dengan kurangnya kemampuan dan keterampilan kerja sehingga seorang angkatan kerja terpaksa menganggur (Amri & Nazamuddin, 2018).

Dari penelitian Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka (2018) diketahui hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini memiliki makna bahwa semakin tinggi tingkat kesempatan kerja, maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kesempatan kerja, maka akan semakin tinggi tingkat kemiskinan masyarakat suatu daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak peluang kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat, maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Apabila kesempatan kerja luas dan semakin banyak menyerap tenaga kerja, maka masyarakat miskin akan semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan yang akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Penelitian ini mendukung beberapa hasil penelitian sebelumnya dan konsisten dengan hasil penelitian Yanthi (2011), Sunusi (2014) dan Sisca, dkk (2016) yang memperoleh hasil bahwa tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pada masyarakat modern dapat diartikan bahwa dengan semakin pesatnya jumlah penduduk menghasilkan angkatan kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang

ada, karena jumlah kesempatan kerja yang semakin sedikit itulah kemudian antara individu satu dengan yang lain saling bersaing untuk memperoleh pekerjaan, dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, maka tingkat kesempatan kerja juga harus diperluas. Perluasan tingkat kesempatan kerja akan terlaksana jika lapangan pekerjaan tersedia. Sehingga perlunya peningkatan sektor informal untuk menekan kemiskinan adalah karena sektor informal merupakan salah satu solusi masalah dalam mengatasi pengangguran.

Konsep tenaga kerja merupakan bagian dari jumlah tertentu tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu. Karena itu penyerapan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal usaha, serta pengeluaran kerja diluar daripada upah atau non upah. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran.

Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lapangan kerja yang tersedia dalam suatu negara, semakin besar pula kesempatan kerja bagi tenaga kerja, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran dan berlaku sebaliknya. Sementara kemiskinan penduduk disuatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan. Semakin besar jumlah kesempatan kerja, semakin kecil jumlah penduduk miskin. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tingkat kemiskinan

secara nyata dipengaruhi oleh kesempatan kerja. Karena itu pemerintah perlu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat bersaing di dunia kerja.

World Bank (2006), hasil penelitian World bank pada tahun 2006 menunjukkan bahwa infrastruktur terbukti memiliki korelasi erat dengan kemiskinan. Selain untuk memudahkan mobilitas masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, infrastruktur yang memadai akan mengundang masuknya investor sehingga menciptakan peluang pergerakan perekonomian yang memberi multiplier effect bagi pengentasan kemiskinan. Penyediaan dan perbaikan fasilitas umum akan meningkatkan akses kelayakan dasar, seperti pembangunan jalan pedesaan juga mengurangi kemiskinan pendapatan dengan meningkatnya produktivitas masyarakat miskin.